



AKULTURASI KEBUDAYAAN PADA MASYARAKAT DI WILAYAH 3T:

PERAN PKBM TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Akulturasi Kebudayaan pada Masyarakat di Wilayah 3T: Peran PKBM terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat

Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud, 2017

V, 93h

ISBN: 978-602-8613-78-1

1. Akulturasi Kebudayaan
2. Program PKBM
3. Budaya Masyarakat
4. Perubahan Sosial
5. 3T

I. JUDUL

II. PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
BALITBANG, KEMDIKBUD

III. SERI PENELITIAN KEBIJAKAN

Tim Penyusun : IGN Made Budiana Setiawan, SS, M.Si.

Dr. Iskandar Agung, M.Si.

Dra. Yufriawati, M.Si.

Ais Irmawati, M.Si.

Penyunting : Mikka Wildha Nurrochsyam, M.Hum.

Nur Berlian V. Ali, M.SE

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdibud/Copyright@2017

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Diperbolehkan mengutip dengan menyebut sumber.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud

Gedung E, Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5736365; Faks. 021-5741664

Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>

e-mail: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Tahun 2017 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang merupakan hasil kegiatan Tahun 2016. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan antara lain untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai wujud akuntabilitas publik Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud, sesuai dengan Renstra Puslitjak Tahun 2016.

Buku Laporan Hasil Penelitian yang diterbitkan tahun ini terkait prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Masyarakat; dan Bidang Kebudayaan.

Kami menyambut gembira atas terbitnya Buku Laporan Hasil Penelitian ini dan mengharapkan informasi hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Desember 2017

Plt. Kepala Pusat,



Dr. Ir. Bastari, M.A.

NIP 196607301990011001

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2016 Bidang Penelitian Kebudayaan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan beberapa kegiatan penelitian sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi direktorat-direktorat terkait, baik di bidang pendidikan maupun kebudayaan. Salah satu kegiatan penelitian tersebut adalah Kajian Akulturasi Kebudayaan pada Masyarakat di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Akulturasi itu sendiri pada dasarnya merupakan perubahan kebudayaan di mana suatu masyarakat menerima dan mengadopsi unsur-unsur baru atau “luar”, baik bersifat materi maupun nonmateri, ke dalam kebudayaan yang didukung semula tanpa menghilangkan kepribadian dan jatidirinya. Unsur baru bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dapat berupa *invention* (inovasi), tetapi juga berasal dari luar kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, proses terjadinya akulturasi untuk wilayah 3T secara keseluruhan adalah melalui media pembelajaran yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Media pembelajaran untuk memungkinkan terjadinya akulturasi lazim disebut dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Itulah sebabnya, penelitian ini, meskipun menggunakan kata “akulturasi”, penekanannya justru pada peranan PKBM-PKBM dalam mengubah konsep berpikir masyarakat, sehingga tidak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh direktorat-direktorat terkait, terutama Direktorat Keaksaraan dan Kesetaraan, yang secara langsung menangani penyelenggaraan PKBM-PKBM di masyarakat.

Jakarta, Desember 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan	6
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Hasil yang Diharapkan	7
F. Penerima Manfaat	7
G. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN KONSEP/TEORI	9
A. Akulturasi	9
B. Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).....	18
C. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).....	27
BAB III PENYELENGGARAAN PKBM DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	39
A. Gambaran Singkat Kabupaten Karimun.....	39
B. Gambaran Masyarakat Kabupaten Karimun	41
C. Penyelenggaraan Program-Program PKBM di Kabupaten Karimun.....	48
BAB IV PENYELENGGARAAN PKBM DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN	57
A. Gambaran Singkat Kabupaten Lebak.....	57
B. Gambaran Masyarakat Kabupaten Lebak	59
C. Penyelenggaraan Program-Program PKBM di Kabupaten Lebak.....	66
BAB V PERAN PKBM DALAM AKULTURASI KEBUDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KARIMUN DAN KABUPATEN LEBAK	82
A. Strategi Akulturasi Kebudayaan di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal	82

B. Respon dan Aspirasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program-Program PKBM.....	84
C. Manfaat Program-Program Usaha Mandiri terhadap Masyarakat	88
D. Langkah-Langkah yang Perlu Diterapkan Pemerintah Berkaitan dengan Program PKBM	92
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran/Rekomendasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akulturası kebudayaan adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. Perpaduan kebudayaan tersebut berlangsung dengan damai dan serasi. Akulturası kebudayaan terjadi sebagai akibat dari interaksi antara kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya, yang mengakibatkan perubahan pola kebudayaan. Perubahan pola kebudayaan tersebut tercermin dalam perilaku dan aktivitas sehari-hari. Proses akulturası ini tidak menyebabkan hilangnya unsur-unsur kebudayaan dari dua atau lebih kelompok masyarakat tersebut. Kebudayaan asli masyarakat masih dapat terlihat cirinya jika dibedakan dan dianalisis dengan kebudayaan luar dalam proses percampuran dua kebudayaan tersebut.

Akulturası kebudayaan dapat terjadi antara masyarakat asli dengan pendatang di daerah manapun, termasuk daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Terdepan adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang berbatasan dengan negara lain. Terluar adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Adapun Tertinggal adalah masyarakat yang tinggal di daerah dengan relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Dalam hal ini akulturası yang dimaksud adalah interaksi antara masyarakat daerah 3 T dengan “agen-agen pemerintah yang menjalankan program-program pembangunan”.

Upaya pembangunan di daerah 3T tidak terlepas dari salah satu poin dari Nawa Cita (9 Agenda Prioritas) yang dicanangkan pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tepatnya pada poin ketiga, yang berbunyi:

“Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.

(Target dan Indikator Pembangunan Nasional Indonesia 2014-2019 Berdasarkan Visi-Misi Presiden Joko Widodo (NAWACITA)).

Poin ketiga tersebut kemudian diturunkan menjadi visi dalam pembangunan daerah tertinggal, yang berbunyi (Zaini, 2010):

“Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal yang setara dengan daerah maju untuk memantapkan ketahanan nasional”.

Berkaitan dengan Nawacita dan visi pembangunan daerah tertinggal di atas, program-program pembangunan di daerah 3T merupakan suatu bentuk pengenalan budaya-budaya baru yang dibawa oleh agen-agen dari pemerintah. Program-program tersebut dapat diterima ataupun ditolak oleh masyarakat. Apabila program-program tersebut diterima masyarakat, maka terjadi akulturasi antara budaya yang dimiliki masyarakat dengan budaya baru yang dibawa oleh agen-agen pemerintah. Sebaliknya, bila ditolak, maka akulturasi tidak dapat terjadi. Efek yang terjadi adalah, agen-agen pemerintah tidak berhasil menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T. Di sisi lain, tidak ada budaya baru yang diterima oleh masyarakat tersebut sehingga mereka menjadi semakin terpinggirkan dan terbelakang.

Dalam kaitannya dengan program-program pembangunan di daerah 3T, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkontribusi melalui program pendidikan masyarakat. Melalui pendidikan masyarakat, sistem nilai yang dianut masyarakat tidak berubah, namun sedikit demi sedikit dapat menyesuaikan diri dengan ketertinggalannya dan dapat mengikuti dinamika

perkembangan zaman. Oleh karena itu diperlukan program-program pendidikan masyarakat yang berbasis pada aspirasi dan pandangan dari masyarakat, sehingga terjadi akulturasi kebudayaan antara masyarakat di daerah 3T dengan agen-agen pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai agen-agen perubahan tersebut. Dengan demikian akan terjadi “*win-win solution*”, di mana program pendidikan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T dapat tercapai, sementara sistem nilai yang dianut masyarakat tidak hilang atau terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah, melainkan dapat dipertahankan dengan melalui proses penyesuaian. Ada yang tidak digunakan lagi, dan ada pula yang dikombinasikan dengan program pemerintah sesuai dengan kondisi lokal masyarakat.

Dalam rangka upaya peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif, pemerintah berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. Program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal, salah satunya adalah melalui Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM). Beberapa alasan sehingga Program PKBM perlu dilaksanakan, yakni: (1) Tingginya angka kemiskinan, (2) Tingginya angka pengangguran, (3) Banyak anak sekolah yang terpaksa mengalami putus sekolah, dan (4) Penuntasan tuna aksara. Melalui program yang diselenggarakan oleh PKBM ini masyarakat diberi pendidikan dan pelatihan keterampilan. Diharapkan PKBM dapat mengembangkan potensi sumber daya dan kearifan lokal yang bernilai ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 11% atau sebanyak 28 juta jiwa dari 254,54 juta penduduk Indonesia (sumber: Bank

Dunia dan BPS). Angka tersebut sudah menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang masih sebesar 11.5% atau 29 juta jiwa. Berdasarkan laporan BPS jumlah pengangguran di Indonesia pada Bulan Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, bertambah 320 ribu orang dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2013 sebanyak 7,24 juta orang. Sedangkan jumlah *drop out* (putus sekolah) anak sekolah sejak tahun ajaran 2010/2011 s.d. 2013/2014 secara nasional sebanyak 2.669.644 anak, yang terdiri atas; SD: 1.334.739 anak, SMP: 585.459 anak, SMA: 272.186 anak, dan SMK: 477.260 anak. Ditambah lulusan SLTP, SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi sesuai data PDSP Kemdikbud tahun 2011 sebesar 1,7 juta anak/tahun (*Petunjuk Teknis Program Desa Vokasi dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016:1-2*). Adapun penyandang tuna aksara pada penduduk usia 15-59 tahun sebesar sebesar 3,86% atau sebanyak 6.165.404 orang (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2014). Dari jumlah tersebut mayoritas adalah perempuan, 66,39%, sedangkan laki-laki sebesar 33,61%. (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2015:1).

Pembelajaran atau pelatihan kewirausahaan dan keterampilan diutamakan terhadap masyarakat yang sedang dan telah mengikuti program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, namun tidak menutup kemungkinan pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, antara lain membangun kewirausahaan, sikap dan perilaku usaha; manajemen usaha (menangkap peluang usaha, merintis usaha, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan dan administrasi, strategi, membangun jejaring usaha/kerja); dan pemberian keterampilan tertentu yang dirintis oleh masyarakat sebagai bidang usaha yang dikembangkan.

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di daerah 3T pada dasarnya merupakan proses akulturasi kebudayaan, di mana segenap hal yang bersifat fisik maupun nonfisik yang terkandung di dalamnya diupayakan dapat

diterima, diadopsi, dan terintegrasi ke dalam kehidupan sosial-budaya yang didukung semula oleh masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan pendidikan di daerah tersebut dapat menjadi *entry point* guna melakukan perubahan, khususnya dalam membangun sumber daya manusia dan kesejahteraan hidup.

Agar proses akulturasi dapat berlangsung baik, dalam arti diterima, diadopsi, dan diintegrasikan oleh masyarakat di daerah 3T karena benar-benar dinilai bermanfaat, diperlukan suatu kajian yang mendalam dan cermat terhadap kehidupan sistem sosial-budaya mereka. Berbagai upaya perlu dikaji, mulai dari pemahaman kondisi dan situasi kebudayaan semula, kebutuhan dan ketepatan penyelenggaraan pendidikan, kebutuhan personal, sarana-prasarana, fasilitas belajar, dan kelengkapan instrumen lainnya, sampai dengan potensi pendorong dan penghambat terjadinya akulturasi kebudayaan. Di sisi lain, kajian perlu pula melibatkan analisisnya terhadap upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman wawasan kebangsaan, bela negara, dan cinta tanah air, serta pemanfaatan dan pelestarian potensi lingkungan alam sekitar secara berkelanjutan (ESD).

B. Permasalahan

Permasalahan yang hendak diangkat dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana respon dan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pendidikan masyarakat atau PKBM di daerah 3T?
2. Apakah program-program PKBM, terutama yang berkaitan dengan Usaha Mandiri dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
3. Langkah-langkah apa yang perlu diterapkan pemerintah agar program PKBM sesuai dengan respon dan aspirasi masyarakat?

C. Tujuan

Tujuan dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi aspirasi dan respon masyarakat terhadap pelaksanaan program pendidikan masyarakat (PKBM) di daerah 3T.
2. Mengkaji program-program PKBM yang berkaitan dengan usaha mandiri, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan aspirasi penyelenggaraan PKBM masyarakat di daerah 3T.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi daerah yang berkarakteristik Terdepan dan Terluar, dan daerah yang berkarakteristik Tertinggal. Karakteristik masyarakat di wilayah Terdepan dan Terluar adalah masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan mempunyai interaksi yang intens dengan masyarakat dari negara-negara tetangga. Karakteristik masyarakat di wilayah Tertinggal adalah masyarakat yang daerahnya tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan.

Untuk daerah yang berkarakteristik Terdepan dan Terluar, dipilih Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk daerah yang berkarakteristik Tertinggal, dipilih Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Proses akulturasi kebudayaan tertuju pada pembangunan pendidikan masyarakat di wilayah 3T.

E. Hasil yang Diharapkan

Dari penelitian ini akan dihasilkan suatu bentuk gambaran utuh mengenai kondisi dan situasi kehidupan sosial-budaya masyarakat di wilayah 3T, sikap terhadap perubahan, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan masyarakat di daerah 3T, serta upaya yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang berwawasan lokalitas, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan sekitar (ESD).

F. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Dikdasmen, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Balitbang Kemdikbud, dan lain-lain).
2. Kementerian Agama, Kanwil Agama, Kandep Agama.
3. Kementerian terkait lainnya (Kemendagri, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal).
4. Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Masyarakat dan Orangtua Murid.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif meliputi: wawancara mendalam, observasi, dan Diskusi Kelompok Terpumpun atau *Focus Group Discussion* (FGD). Untuk memperkaya data yang diperoleh di lapangan, dilakukan pula studi pustaka, baik sebelum maupun setelah penelitian di lapangan.

Wawancara dan observasi dilaksanakan guna mengumpulkan data dan informasi dari instansi terkait (seperti: Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik) dan lembaga-lembaga masyarakat, khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Focus Group Discussion (FGD) melibatkan beberapa pengurus PKBM dan aparat dinas pendidikan yang menangani bidang pendidikan masyarakat/keaksaraan dan kesetaraan.

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dengan masyarakat dan instansi pemerintah, dan dipadukan dengan hasil FGD, kemudian dianalisis untuk memperoleh sintesis.

BAB II

LANDASAN KONSEP/TEORI

A. Akulturasi

1. Pengertian/Konsep Akulturasi

Istilah akulturasi berasal bahasa latin *acculturate* yang berarti “tumbuh dan berkembang bersama”. Secara umum pengertian akulturasi adalah perpaduan antarbudaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Pada umumnya akulturasi kebudayaan terjadi karena unsur budaya yang baru dinilai memberikan manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat (*Inilah Pengertian dan Contoh Akulturasi Budaya*. <http://carajuki.com/inilah-pengertian-dan-contoh-akulturasi-budaya/>, diunduh tanggal 21 Maret 2016).

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, akulturasi budaya adalah hasil interaksi manusia berupa percampuran dari beberapa macam kebudayaan secara perlahan menuju bentuk budaya baru. Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah kembali ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri (Koentjaraningrat, 1990: 253-254). Syarat terjadinya proses akulturasi adalah adanya persenyawaan (*affinity*), yaitu penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut, kemudian adanya keseragaman (*homogeneity*), seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya. Akulturasi bisa terjadi melalui kontak budaya yang bentuknya bermacam-macam, antara lain sebagai berikut.

- a. Kontak sosial pada seluruh lapisan masyarakat, sebagian masyarakat, atau bahkan antarindividu dalam dua masyarakat.
- b. Kontak budaya dalam situasi bersahabat atau situasi bermusuhan.
- c. Kontak budaya antara kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, maupun ilmu pengetahuan.
- d. Kontak budaya antara masyarakat yang jumlah warganya banyak atau sedikit.
- e. Kontak budaya baik antara sistem budaya, sistem sosial, maupun unsur budaya fisik.

Secara umum, akulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang muncul saat terjadi penyatuan dua budaya yang berbeda menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Hal ini bisa terjadi jika terdapat suatu budaya asing yang masuk dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menghilangkan budaya aslinya.

Akulturasi kebudayaan juga tidak terlepas dari program-program pembangunan suatu negara. Inti penerapan pembangunan itu adalah persentuhan antarsistem budaya, di mana program pembangunan sebagai sistem budaya asing yang membawa nilai-nilai, gagasan, ide-ide baru diintrodusir dan dikomunikasikan ke dalam sistem budaya yang didukung semula oleh masyarakat penerimanya (*resipien*). Melalui persentuhan tersebut diharapkan berlangsung proses akulturasi oleh masyarakat penerimanya, tanpa menghilangkan jatidiri semula. Unsur baru menjadi bagian dalam kebudayaan semula, digunakan sebagai orientasi dan memperkaya kehidupan masyarakat penerimanya.

2. Teori-Teori Perubahan Sosial dalam Masyarakat

Akulturasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial dalam masyarakat. Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial

merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis (*Teori-Teori Perubahan Sosial*. <http://alfinnitihardjo.ohlog.com/teori-teori-perubahan-sosial.oh112689.html%20pada%20pukul%2022.00>, diunduh tanggal 10 Oktober 2016).

Terdapat banyak definisi dari para ahli mengenai perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut William F. Ogburn, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik secara materi maupun nonmateri. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang melibatkan struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Gillin and Gillin, perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara hidup dalam suatu lingkungan masyarakat. Perubahan tersebut bisa saja terjadi karena perubahan secara geografis, kebudayaan material, kependudukan, ideologi, dan bisa karena munculnya penemuan-penemuan baru oleh masyarakat. Adapun menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (*Pengertian Perubahan Sosial, Teori-Teori Perubahan Sosial, Bentuk Perubahan Sosial, dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perubahan Sosial*. <http://www.softilmu.com/2015/02/Pengertian-Teori-Bentuk-Faktor-Perubahan-Sosial-Adalah.html>, diunduh tanggal 10 Oktober 2016).

Terdapat empat teori tentang perubahan sosial, yakni: evolusi, fungsional, siklus, dan konflik. Adapun penjelasan dari masing-masing teori tersebut adalah sebagai berikut.

a. Teori Evolusi (*Evolutionary Theory*)

Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal sampai perubahan terakhir. Saat telah tercapai perubahan terakhir maka tidak akan terjadi perubahan lagi. Pada dasarnya teori evolusi ini berpijak pada teori Evolusi Darwin dan dipengaruhi pemikiran Herbert Spencer.

Ada dua tokoh yang paling berpengaruh dalam teori Evolusi, yakni Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Emile Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena suatu evolusi mempengaruhi perorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Adapun Ferdinand Tonnies berpendapat bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan komperatif menjadi tipe masyarakat besar yang menjalin hubungan terspesialisasi dan impersonal.

Teori ini memiliki kelemahan, karena tidak bisa menjelaskan jawaban untuk pertanyaan “mengapa masyarakat berubah?”. Teori ini hanya menjelaskan berbagai perubahan yang terjadi.

b. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terbentuk dari konflik. Konflik ini berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas sehingga melahirkan sebuah perubahan sosial yang dapat mengubah sistem sosial tersebut.

Tokoh yang berpengaruh dalam teori ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendort. Menurut Karl Marx, konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan paling berpengaruh terhadap semua perubahan sosial yang terjadi. Menurut Ralf Dahrendort, setiap perubahan sosial merupakan hasil dari konflik yang terjadi dalam kelas masyarakat.

c. Teori Fungsionalis (*Functionalist Theory*)

Teori Fungsionalis menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi teori fungsional hanya menerima perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak bermanfaat akan dibuang (tidak dipakai).

Tokoh yang berpengaruh dalam teori ini adalah William Ogburn. Menurutnya, biarpun unsur-unsur masyarakat saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan perubahan setiap unsur tidaklah sama. Ada unsur yang berubah dengan cepat, ada pula yang perubahannya lambat sehingga tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau *cultural lag*.

Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak.

d. Teori Siklis/Siklus (*Cyclical Theory*)

Teori siklus menjelaskan bahwa, perubahan sosial terjadi secara bertahap (sama seperti teori evolusi), namun perubahan tidak akan berhenti pada tahapan “terakhir” yang sempurna, namun akan berputar kembali ke awal untuk peralihan ke tahapan selanjutnya. Sehingga digambarkan seperti sebuah siklus.

Tokoh yang berpengaruh dalam teori siklus adalah Oswald Spenger dan Arnold Toynbee. Oswald berpendapat bahwa setiap masyarakat berkembang melalui empat tahap. Contoh sederhananya adalah pertumbuhan manusia, yang terdiri dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Arnold Toynbee mengatakan bahwa perubahan sosial, baik itu kemajuan maupun suatu kemunduran, dapat dijelaskan melalui konsep-konsep kemasyarakatan yang selalu berhubungan satu sama lain, yaitu tantangan dan tanggapan.

Dari keempat teori perubahan sosial tersebut, yang sesuai untuk menjelaskan perubahan masyarakat di daerah 3T adalah teori fungsional. Teori fungsional ini menjelaskan fungsi masing-masing anggota sistem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kondisi perubahan di daerah 3T tersebut, khususnya daerah Tertinggal, terjadi dengan lambat, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial atau *cultural lag* di antara anggota masyarakat.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Beberapa faktor internal, antara lain: pertumbuhan penduduk, penemuan baru, invensi (kombinasi baru dari suatu pengetahuan yang sudah ada), sistem ideologi (keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu), dan lain-lain. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, seperti: lingkungan fisik (musibah, bencana alam, dan lain-lain), peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain (Umasih,

dkk. 2007. Geografi dan Sosiologi. Jakarta: Ganesa Exact; *Pengertian Perubahan Sosial, Teori-Teori Perubahan Sosial, Bentuk Perubahan Sosial, dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perubahan Sosial*. <http://www.softilmu.com/2015/02/Pengertian-Teori-Bentuk-Faktor-Perubahan-Sosial-Adalah.html>, diunduh tanggal 10 Oktober 2016).

3. Akulturasi di Bidang Pendidikan

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa akulturasi kebudayaan pada dasarnya merupakan perubahan kebudayaan di mana suatu masyarakat menerima dan mengadopsi unsur-unsur baru atau “luar”, baik bersifat materi maupun nonmateri, ke dalam kebudayaan yang didukung semula tanpa menghilangkan kepribadian dan jati dirinya. Unsur baru tersebut bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri berupa *invention* atau inovasi, tetapi juga berasal dari luar kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Unsur baru tersebut masuk dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan. Salah satu kegiatan pendidikan yang ada dalam masyarakat di wilayah 3T adalah kegiatan PKBM. Kegiatan PKBM mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi warga belajar untuk melakukan kegiatan usaha mandiri. Dalam hal ini salah satu perubahan yang dilaksanakan secara sengaja atau terencana melalui penerapan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Masyarakat sebagai warga belajar kemudian mulai melakukan kegiatan usaha mandiri sebagai bentuk program kegiatan PKBM.

Sejak dijalkannya program pembangunan di negara kita, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang pesat. Penerapan pembangunan sebagai proses akulturasi kebudayaan, telah menunjukkan adanya perubahan kehidupan masyarakat di segala bidang. Perubahan dan kemajuan bangsa Indonesia mulai memperlihatkan kesejajaran dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kehidupan masyarakat Indonesia menuju pada

modernisasi, baik dari sisi nilai, sikap, perilaku, maupun alih ilmu pengetahuan dan teknologi rasional mempunyai dampak positif dan negatif. Tujuan penerapan pembangunan nasional memang merupakan upaya untuk memperbaiki tingkat dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia melalui teknik dan metode tertentu.

Program pembangunan yang diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tersebut merupakan suatu bentuk akulturasi kebudayaan, di mana pemerintah merupakan agen-agen yang membawa perubahan terhadap masyarakat. Akulturasi kebudayaan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, pemerintahan, teknologi, dan lain-lain. Akulturasi kebudayaan dalam bidang pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan modern. Melalui pendidikan, pemerintah bercita-cita mengubah kehidupan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain.

Kaitannya dengan pembangunan di bidang pendidikan, konstitusi mengamanatkan, negara berkewajiban untuk mencerdaskan bangsa, yang kemudian dijawantahkan ke dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, penyelenggaraan pendidikan nasional belumlah merata. Meskipun pembangunan bidang pendidikan telah berjalan relatif lama, daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) merupakan tempat-tempat yang masih minim perhatian dan kepedulian dalam pembangunan bidang pendidikan tersebut. Tidak heran apabila masyarakat di daerah 3T hidup dalam kekurangan, dan jauh dari sejahtera. Padahal, optimalisasi penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Pembangunan di bidang pendidikan di daerah 3T khususnya, dapat menjadi *entry point* dalam meningkatkan harkat dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah tersebut. Nantinya daerah 3T juga dapat setara dan maju bersama daerah lainnya di Indonesia.

Selama ini apakah program pembangunan di bidang pendidikan yang dibutuhkan dan perlu dilaksanakan di daerah 3T, sudah meningkatkan kesejahteraan hidup? Seharusnya pembangunan bidang pendidikan tidak hanya tertuju pada bentuk pendidikan formal untuk anak usia sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pendidikan nonformal yang khususnya diarahkan pada kelompok orang dewasa melalui program belajar dan usaha. Bentuk pendidikan nonformal ini merupakan upaya pembelajaran, sekaligus peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Penerapan program pendidikan masyarakat (di bawah naungan pengelolaan Direktorat Jenderal PAUD Dikmas (Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat), selayaknya perlu memperhatikan aspek sosial budaya yang didukung oleh masyarakat 3T sebagai penerimanya (resipien). Perhatian, kepedulian, serta kesesuaian program dengan aspek sosial budaya itu bukan hanya dapat menghindarkan penolakan penerimanya, tetapi cenderung diadopsi dan dirasakan manfaatnya oleh mereka. Penerimaan dan pengadopsian pembangunan bidang pendidikan akan berfungsi ganda, di satu sisi dapat mencerminkan proses akulturasi yang disengaja atau terencana untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup. Namun di sisi lain dapat menjadi penguat wawasan kebangsaan yang berisi kesadaran, kebanggaan, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bela negara untuk mempertahankan kelanggengan kedaulatan NKRI.

Sulit dielakkan, bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup pesat, salah satunya sebagai hasil dari penerimaan terhadap penyelenggaraan pendidikan modern. Namun di sisi lain proses akulturasi pembangunan pendidikan ini pun masih belum dapat diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia, karena berbagai alasan. Padahal pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, seperti membangun gedung-

gedung sekolah, melengkapi fasilitas belajar, pengadaan buku-buku pelajaran dan buku pengayaan, pengadaan media dan alat peraga, penerapan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi Wajar 12 Tahun. Selain itu juga dengan membebaskan orangtua dari beban biaya pendidikan anak. Akhir-akhir ini pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran bagi penyediaan perangkat komputer dan jaringan internet agar ekosistem pendidikan dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.

Berbagai gejala hambatan program pemerintah pun diperlihatkan dari belum dapat diterimanya pembangunan pendidikan tersebut oleh masyarakat setempat. Respon dan aspirasi keluarga yang rendah terhadap pendidikan anak, masih tingginya angka putus sekolah (*drop out*) di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kecenderungan orangtua maupun anaknya lebih memilih bekerja mencari nafkah daripada melanjutkan pendidikannya. Walaupun sekolah atau kampus didirikan di lingkungan masyarakat tertentu namun belum mampu mengubah aspirasi orangtua terhadap pendidikan anak yang setinggi-tingginya. Keberadaan sekolah atau kampus baru berdampak berupa pembukaan peluang bagi sebagian warga masyarakat setempat untuk menyediakan penyewaan rumah atau kamar kos bagi siswa atau mahasiswa yang berasal dari daerah lain.

B. Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

Penerapan pembangunan nasional haruslah dilakukan di seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu kelompok masyarakat yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) juga seharusnya mendapatkan program pembangunan tersebut. Daerah Terdepan adalah daerah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik yang berbatasan laut maupun yang berbatasan

daratan. Terdapat tiga negara yang berbatasan daratan dengan Indonesia, yakni: Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Adapun negara yang berbatasan pada wilayah laut dengan Indonesia meliputi 10 negara, yakni: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan PNG. Daerah Terluar adalah daerah yang terjauh dan terpencil, sekaligus lokasinya relatif sulit dijangkau, sarana transportasi relatif jarang dan terbatas. Daerah Terluar secara geografis juga berbatasan dengan negara-negara tetangga, khususnya perbatasan laut. Baik daerah Terdepan maupun daerah Terluar memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara-negara tetangga, sehingga mereka sangat memerlukan kemampuan dan pendidikan untuk menerima perpaduan budaya antarnegara. Bentuk perpaduan antarnegara ini terlihat setiap hari dalam aktivitas ekonomi sosial maupun budaya. Oleh karena itu mereka memerlukan program pendidikan agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya.

Tabel 2.1
Kabupaten dan Kota yang Termasuk Daerah Terdepan dan Terluar

No.	Provinsi	Kabupaten Tertinggal
1.	Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Sabang
2.	Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Serdang Bedagai
3.	Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Dumai • Bengkalis • Rokan Hilir • Indragiri Hilir • Kepulauan Meranti
4.	Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Kepulauan Anambas • Karimun • Kota Batam • Natuna • Bintan

No.	Provinsi	Kabupaten Tertinggal
5.	Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Kupang • Timor Tengah Utara • Belu • Alor • Rote Ndao
6.	Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Bengkayang • Sanggau • Sintang • Kapuas Hulu
7.	Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Nunukan • Malinau • Kutai Barat
8.	Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Kepulauan Talaud • Kepulauan Sangihe
9.	Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku Barat Daya • Maluku Tenggara • Kepulauan Aru
10.	Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Morotai
11.	Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Raja Ampat
12.	Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Keerom • Merauke • Boven Digoel • Pegunungan Bintang • Kota Jayapura • Supiori

Sumber: Bappenas. 2014

Adapun Pengertian Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Berdasarkan ketetapan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat enam indikator yang menjadi dasar penetapan suatu daerah termasuk Daerah Tertinggal, yakni: ekonomi masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur,

kapasitas daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Adapun penjelasan dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ekonomi Masyarakat

Indikator ekonomi masyarakat meliputi: (a) tingginya jumlah keluarga miskin dan keluarga prasejahtera dan sejahtera 1; (b) rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingginya persentase Kedalaman Kemiskinan.

2. SDM

Indikator SDM meliputi: (a) tingginya jumlah penduduk, tingginya persentase angkatan kerja, dan persentase pengangguran; (b) rendahnya angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Infrastruktur

Indikator infrastruktur meliputi: (a) terbatasnya puskesmas, dan poliklinik desa serta sedikitnya jumlah dokter; (b) sedikitnya fasilitas pendidikan; (c) rendahnya persentase rumah tangga pengguna listrik dan telepon; dan (d) sedikitnya jumlah pasar.

4. Kapasitas Daerah

Indikator kapasitas daerah meliputi: (a) rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten; (b) kecilnya celah fiskal yang dapat digali kabupaten.

5. Aksesibilitas

Indikator aksesibilitas meliputi: Rendahnya kualitas infrastruktur jalan dan terbatasnya sarana transportasi (baik transportasi darat, laut, dan udara), sehingga menambah jarak dan waktu tempuh.

6. Karakteristik Daerah

Karakteristik daerah menentukan masuk daerah tertinggal atau tidak, misalnya: daerah rawan longsor, rawan gempa dan tsunami, pulau-pulau kecil terisolir, desa-desa *enclave* di tengah hutan, dan lain-lain.

(Indikator Daerah Tertinggal.

<http://syahyutivariabel.blogspot.co.id/2011/08/indikator-daerah-tertinggal.html>, diunduh tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.04)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat 122 kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah tertinggal. Adapun kabupaten-kabupaten yang masih termasuk daerah tertinggal tersebut dapat diketahui pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Kabupaten-Kabupaten yang Termasuk Daerah Tertinggal

No.	Provinsi	Kabupaten Tertinggal
1.	Aceh	<ul style="list-style-type: none">• Aceh Singkil
2.	Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none">• Nias• Nias Selatan• Nias Utara• Nias Barat
3.	Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none">• Kepulauan Mentawai• Solok Selatan• Pasaman Barat.
4.	Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none">• Musi Rawas• Musi Rawas Utara
5.	Bengkulu	<ul style="list-style-type: none">• Seluma.
6.	Lampung	<ul style="list-style-type: none">• Lampung Barat• Pesisir Barat
7.	Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">• Bondowoso• Situbondo• Bangkalan• Sampang.
8.	Banten	<ul style="list-style-type: none">• Pandeglang• Lebak
9.	Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none">• Lombok Barat• Lombok Tengah

No.	Provinsi	Kabupaten Tertinggal
		<ul style="list-style-type: none"> • Lombok Timur • Sumbawa • Dompu • Bima • Sumbawa Barat • Lombok Utara
10.	Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Sumba Barat • Sumba Timur • Kupang • Timor Tengah Selatan • Timor Tengah Utara • Belu • Alor • Lembata • Ende • Manggarai • Rote Ndao • Manggarai Barat • Sumba Tengah • Sumba Barat Daya • Nagekeo • Manggarai Timur • Sabu Raijua • Malaka.
11.	Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Sambas • Bengkayang • Landak • Ketapang • Sintang • Kapuas Hulu • Melawi • Kayong Utara.
12.	Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Seruyan
13.	Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Hulu Sungai Utara
14.	Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Nunukan • Mahakam Ulu
15.	Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Banggai Kepulauan • Donggala

No.	Provinsi	Kabupaten Tertinggal
		<ul style="list-style-type: none"> • Toli-Toli • Buol • Parigi Moutong • Tojo Una-Una • Sigi • Banggai Laut • Morowali Utara
16.	Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Janeponto
17.	Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> • Konawe • Bombana; • Konawe Kepulauan
18.	Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Boalemo • Pohuwato • Gorontalo Utara
19.	Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Polewali Mandar • Mamuju Tengah
20.	Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku Tenggara Barat • Maluku Tengah • Buru • Kepulauan Aru • Seram Bagian Barat • Seram Bagian Timur • Maluku Barat Daya • Buru Selatan
21.	Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Halmahera Barat • Kepulauan Sula • Halmahera Selatan • Halmahera Timur • Pulau Morotai • Pulau Taliabu
22.	Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Teluk Wondama • Teluk Bintuni • Sorong Selatan • Sorong • Raja Ampat • Tambrauw • Maybrat.
23.	Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Merauke

No.	Provinsi	Kabupaten Tertinggal
		<ul style="list-style-type: none"> • Jayawijaya • Nabire • Kepulauan Yapen • Biak Numfor • Paniai • Puncak Jaya • Boven Digoel • Mappi • Asmat • Yahukimo • Pegunungan Bintang • Tolikara • Sarmi • Keerom • Waropen • Supiori • Memberamo Raya • Nduga • Lanny Jaya • Memberamo Tengah • Yalimo • Puncak • Dogiyai • Intan Jaya • Deiyai

(122 Daerah Ini Ditetapkan Pemerintah Sebagai Daerah Tertinggal 2015-2019

<http://setkab.go.id/122-daerah-ini-ditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019/>, diunduh tanggal 10 Oktober 2016).

Upaya pemerintah untuk memajukan daerah-daerah tertinggal telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, perlu ada pengertian baru dalam kajian akulturasi. Akulturasi tidak lagi dimaknai sebagai interaksi antara kebudayaan masyarakat asli dengan masyarakat pendatang yang berlangsung bertahun-tahun, sehingga menghasilkan kebudayaan baru, melainkan interaksi antara masyarakat asli dengan agen-agen (aparatur) pemerintah maupun swasta, seperti guru, dokter, pegawai pemerintah, TNI, polisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Kehadiran agen-agen pemerintah dan swasta tersebut dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana, seperti: sekolah, puskesmas, jalan raya, posko TNI, dan lain-lain. Mereka mengemban tugas untuk melaksanakan program-program pemerataan pembangunan, yang diharapkan dapat mengentaskan masyarakat daerah 3T dari indikator-indikator ketertinggalannya.

Kehadiran agen-agen pemerintah (dan LSM) dengan program-program pembangunannya tersebut tentu membawa budaya-budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat di daerah 3T, seperti: pengenalan sanitasi untuk hidup sehat, pengenalan budi daya rumput laut dan mutiara untuk meningkatkan hasil kelautan, pengenalan teknologi pembangkit listrik dari sumber daya alam setempat, dan lain-lain. Budaya-budaya baru yang dibawa agen-agen dari pemerintah tersebut dapat diterima ataupun ditolak oleh masyarakat. Apabila diterima oleh masyarakat tersebut, maka terjadi akulturasi antara budaya yang dimiliki masyarakat daerah 3T dengan budaya baru yang dibawa oleh agen-agen pemerintah. Melalui akulturasi kebudayaan tersebut, diharapkan program-program pembangunan dari pemerintah ini dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di daerah 3T. Namun apabila budaya-budaya baru tersebut ditolak oleh masyarakat, maka akulturasi tidak dapat terjadi atau berjalan tidak efektif. Efek yang terjadi adalah, agen-agen pemerintah tidak berhasil menjalankan

program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T.

Penerimaan ataupun penolakan budaya-budaya baru oleh masyarakat di daerah 3T dipengaruhi oleh sistem nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat tersebut. Misalnya, sistem nilai bahwa budi daya rumput laut dan mutiara akan merusak ekosistem laut. Atau pembangunan pembangkit listrik tenaga air sungai akan merusak lingkungan hutan, dan lain-lain. Dalam hal ini sistem nilai tersebut diajarkan secara turun-temurun kepada masyarakat bukan melalui pendidikan formal, melainkan melalui pendidikan nonformal. Melalui pendidikan nonformal di masyarakat inilah sebenarnya sistem nilai yang dianut masyarakat tidak berubah, namun sedikit demi sedikit dapat menyesuaikan diri dengan ketertinggalannya dan dapat mengikuti dinamika perkembangan zaman.

C. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1. Pengertian PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal untuk memberikan layanan pendidikan nonformal dan informal, yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan pendidikan kepemudaan. Prinsip dasar pembentukan PKBM di masyarakat adalah “dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Artinya, (a) PKBM berdiri dan memberikan berbagai layanan didasarkan atas prakarsa dari masyarakat setempat, bukan atas perintah atau tekanan dari pemerintah atau perorangan; (b) program dan kegiatan yang dilaksanakan di PKBM dilaksanakan oleh masyarakat setempat; (c) semua program dan kegiatan tersebut pada dasarnya untuk

kepentingan masyarakat setempat, untuk membangun lingkungannya dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

PKBM juga merupakan suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberdayaan pendidikan di masyarakat yang dibarengkan dengan usaha mandiri.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis satuan pendidikan nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat, antara lain: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), majelis taklim, kelompok belajar, rumah pintar, balai belajar bersama, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Dari beberapa satuan pendidikan nonformal tersebut, yang paling banyak diampu oleh pemerintah hanya PKBM dan LKP.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan nonformal adalah PKBM. Diselenggarakannya PKBM adalah sebagai tempat bagi warga untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sarana prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dikatakan sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat, karena di dalamnya menyediakan berbagai macam jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti: Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, kursus-kursus, KBU, dan jenis pendidikan lainnya. Pada umumnya pengelola dan penyelenggara PKBM adalah masyarakat, tetapi juga difasilitasi oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional, melalui Subdin Pendidikan Luar Sekolah (PNF) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota) (Hiryanto, 2009).

Berdasarkan pihak yang mengelola PKBM, terdapat tiga tipe penyelenggaraan PKBM, yakni:

a. PKBM berbasis masyarakat (*community based*)

Pengelolaan PKBM ini dicirikan dengan keberlangsungannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM ini adalah tempat pembelajaran dan sumber informasi bagi masyarakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, berisi berbagai jenis keterampilan fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

b. PKBM berbasis kelembagaan (*institution based*)

Pengelolaan PKBM ini dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta (yayasan/lembaga swadaya masyarakat). Masyarakat menjadi kelompok sasaran program atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Semua sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya biaya disediakan oleh lembaga. Keterlibatan masyarakat hanya sebatas mengikuti program kegiatan yang disediakan oleh PKBM tersebut.

c. PKBM Komprehensif

PKBM ini merupakan kombinasi antara PKBM berbasis masyarakat dan PKBM berbasis kelembagaan. Ciri utama dari jenis PKBM ini adalah penyelenggaraannya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah/swasta dengan masyarakat. Bentuknya dapat berupa PKBM berbasis kelembagaan yang mengembangkan PKBM di sekitarnya yang berbasis masyarakat (Hiryanto, 2009).

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan PKBM

Terdapat beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKBM di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 26, ayat 4: tentang satuan pendidikan dan jenis-jenisnya.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- c. Petunjuk Teknis Penguatan PKBM melalui Permagangan dan Tata Cara Memperoleh Bantuan dari Direktorat PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- d. Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan PKBM dan Tata Cara Memperoleh Bantuan dari Direktorat Pendidikan dan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Informal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kelima (Pendidikan Non Formal) Pasal 26 disebutkan bahwa:

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal untuk memberikan layanan pendidikan nonformal dan informal, yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan pendidikan kepemudaan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pasal 1, disebutkan bahwa PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

3. Sejarah dan Fungsi PKBM

Sejarah keberadaan PKBM merupakan tindak lanjut dari gagasan *Community Learning Center* yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an. Namun secara kelembagaan nama PKBM baru mulai dikenal pada tahun 1998, sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan (Sudjana, 2003: 2).

Lahirnya PKBM merupakan respon berbagai permasalahan di Indonesia yang membutuhkan dukungan satuan pendidikan nonformal untuk memecahkannya. Masalah tersebut meliputi:

- a. Masih tingginya angka buta aksara di Indonesia yang mencapai 3,8% atau 6,4 juta jiwa (BPS 2012);
- b. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih 29 juta (BPS 2013);
- c. Angka *drop out* dan lulus tidak melanjutkan berkisar 1,7 juta anak setiap tahun (PDSP 2012);
- d. Jumlah anak usia 0-6 tahun mencapai 31 juta anak dan baru berkisar 62% yang terlayani pendidikan anak usia dini; dan
- e. Kesenjangan pembangunan antarprovinsi masih tinggi. Adanya satuan pendidikan nonformal di daerah diharapkan menjadi motor penggerak dalam pengentasan buta aksara, kemiskinan dan melayani pendidikan bagi masyarakat yang tidak beruntung.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal. Sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan unit yang sangat penting dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan program pendidikan nonformal. Posisi penting ini di mana banyaknya sasaran program pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal informal (PNFI) namun masih terbatasnya lembaga pendidikan yang mampu menjangkau komunitas PNFI sampai pelosok desa (Petunjuk Teknis

Penguatan PKBM melalui Permagangan dan Tata Cara Memperoleh Bantuan, 2015: 1). Saat ini terdapat sekitar 11 ribu PKBM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan nonformal, pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat/warga negara yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti serta menikmati proses pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah. Umumnya masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan-keterbatasan ekonomi dan fisik. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi penyelenggaraan pendidikan melalui jalur nonformal adalah sebagai pengganti, melengkapi, dan menambah terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan di sekolah (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah).

Sebagaimana diketahui bahwa PKBM adalah wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, milik masyarakat dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat. Pembentukan PKBM dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber potensi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha/keterampilan yang secara ekonomi, sosial dan budaya dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar khususnya dan warga masyarakat sekitarnya (*Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. <http://visiuniversal.blogspot.co.id/2014/02/pusat-kegiatan-belajar-masyarakat-pkbm.html>, diunduh tanggal 23 Agustus 2016).

Manfaat kehadiran PKBM telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Dengan moto PKBM yaitu: dari, oleh, dan untuk masyarakat maka masyarakat tidak lagi hanya mengikuti program-program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah melainkan juga mereka dapat merencanakan, membiayai, melaksanakan, dan menilai hasil, dan dampak program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan potensi-potensi yang terdapat di lingkungannya, sehingga masyarakat pun bertanggung jawab terhadap kegiatan PKBM tersebut. PKBM adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya (*BPKB Jatim*, 2000: 6).

PKBM ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan adanya pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM, maka akan banyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal. PKBM diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupannya. Agar mampu mengembangkan potensi-potensi tersebut, maka diupayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, PKBM sebagai basis pendidikan bagi masyarakat perlu dikembangkan secara komprehensif, fleksibel, dan beraneka ragam serta terbuka bagi semua kelompok usia dan anggota masyarakat sesuai dengan peranan, hasrat, kepentingan, dan kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karena itu jenis pendidikan yang diselenggarakan dalam PKBM juga beragam sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pembelajaran masyarakat di mana PKBM tersebut dibentuk dan didirikan.

Dalam penyelenggaraan program-program di PKBM, tentu diperlukan dana yang memadai. Dana tersebut pada umumnya diperoleh melalui beberapa sumber, antara lain: swadaya dari masyarakat (melalui iuran peserta); hasil usaha di PKBM (misalnya membuka warung untuk kebutuhan masyarakat/peserta didik), atau bantuan dari pemerintah (baik kabupaten/kota maupun provinsi).

4. Fungsi dan Azaz PKBM

PKBM sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, secara kelembagaan mempunyai fungsi yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. Sebagai tempat kegiatan belajar bagi warga masyarakat, artinya tempat bagi warga masyarakat untuk menimba ilmu dan memperoleh berbagai jenis keterampilan dan pengetahuan fungsional yang dapat didayagunakan secara tepat dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
- b. Sebagai tempat pusanan berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, artinya bahwa PKBM diharapkan dapat digunakan sebagai tempat pertukaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, sehingga menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
- c. Sebagai pusat dan sumber informasi, artinya bahwa PKBM merupakan tempat warga masyarakat untuk menanyakan berbagai informasi tentang berbagai jenis kegiatan pembelajaran dan keterampilan fungsional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. PKBM dapat menyediakan informasi kepada anggota masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional untuk bekal hidup (*life skill*).

- d. Sebagai ajang tukar menukar keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dengan prinsip saling membelajarkan melalui diskusi-diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi.
- e. Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta nilai-nilai tertentu bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu dapat juga digunakan untuk berbagai pertemuan bagi penyelenggaraan dan narasumber baik intern maupun ekstern.
- f. Sebagai loka belajar yang tidak pernah berhenti, artinya PKBM merupakan suatu tempat yang secara terus menerus digunakan untuk proses belajar mengajar (*BPKB Jatim*, 2000: 8).

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwasanya fungsi dari PKBM dalam masyarakat sebagai proses kegiatan belajar yang bersifat nonformal untuk memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan.

Pada prinsipnya PKBM dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperhatikan segala potensi yang ada disekitarnya. Oleh karena itu dalam proses pembentukan dan penyelenggaraannya lebih menggunakan metode/pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang secara garis besar prinsip-prinsipnya meliputi: belajar dari masyarakat, masyarakat sebagai subjek, saling membelajarkan, pemberdayaan masyarakat mengenai potensi dan kesadaran, perumusan masalah dan penentuan prioritas, identifikasi pemecahan masalah, pemilihan alternative pemecahan, perencanaan dan penyajian rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan supervisi, dan evaluasi (*BPKB Jatim*, 2000: 11).

5. Program-Program PKBM

PKBM memiliki beberapa jenis program yang terangkum di dalamnya, yakni:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Program pemberantasan buta huruf melalui pendekatan Keaksaraan Fungsional (KF). Program KF adalah program pendekatan minat dan kebutuhan masyarakat dan melekat pada kehidupan sehari-hari. Misalnya: program-program yang berkaitan dengan pertanian, nelayan, peternakan, dan lain-lain. Program KF ini terdiri dari:
 - 1) Keaksaraan Dasar (berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014). Program ini berlangsung selama 144 jam (sekitar 6 bulan). Bila mempunyai kompetensi yang memadai, peserta warga belajar dapat “melompat” ke keaksaraan lanjutan.
 - 2) Keaksaraan Lanjutan (berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015). Program ini berlangsung selama 86 jam (sekitar 3 bulan). Keaksaraan Lanjutan meliputi:
 - a) Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

Pada program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), warga belajar mendapatkan pelajaran tentang keuangan sederhana (pemasukan-pengeluaran, untung-rugi, dan lain-lain). Contoh: usaha membuat jajanan pasar, membuat kerajinan, beternak lele. Pada program ini warga belajar tidak diajari secara perorangan, tetapi berkelompok. Satu kelompok sekitar 10 orang, bukan perorangan. Program KUM adalah sebagai media untuk memelihara kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
 - b) Program Multikeaksaraan

Pada program multikeaksaraan ini, warga belajar diajarkan mengenai sosial-budaya, Teknologi Informasi Komputer (TIK), kewarganegaraan, dan lain-lain. Pelajaran-pelajaran tersebut bermanfaat untuk hidup bermasyarakat. Namun sampai saat ini

materi-materi untuk pelajaran-pelajaran tersebut masih dibahas di Direktorat Keaksaraan dan Kesetaraan.

Setelah lulus dari program Keaksaraan Lanjutan, warga belajar dapat melanjutkan ke Paket A, Paket B, Paket C. Mereka mendapatkan ijazah yang disebut SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara).

- c. Program Kesetaraan Pendidikan Dasar melalui Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Metode pembelajarannya: dapat dilakukan dengan tatap muka, tutorial, atau belajar mandiri. Metode tatap muka, yakni pertemuan dan pembelajaran di kelas. Metode tutorial, yakni membahas soal-soal bersama tutor mereka. Adapun metode mandiri, yakni soal/tugas dipelajari dan dikerjakan di rumah. Soal-soal yang diberikan pada metode tutorial adalah soal-soal pelajaran yang nantinya akan diujikan dalam Ujian Nasional. Di dalam program kesetaraan pendidikan dasar tersebut, warga peserta belajar juga mendapatkan berbagai keterampilan, seperti menjahit dan komputer.
- d. Program Pendidikan Keberlanjutan, antara lain berupa kelompok belajar usaha, magang, dan kursus-kursus. Untuk dapat direalisasikan, program ini harus dikerjasamakan dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- e. Program Lintas Sektor Lainnya (Sebagai Pendukung)
PKBM juga menyelenggarakan program-program lintas sektor lainnya, antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender, pendidikan kepemudaan. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013.

(Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2003).

BAB III

PENYELENGGARAAN PKBM

DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Gambaran Singkat Kabupaten Karimun

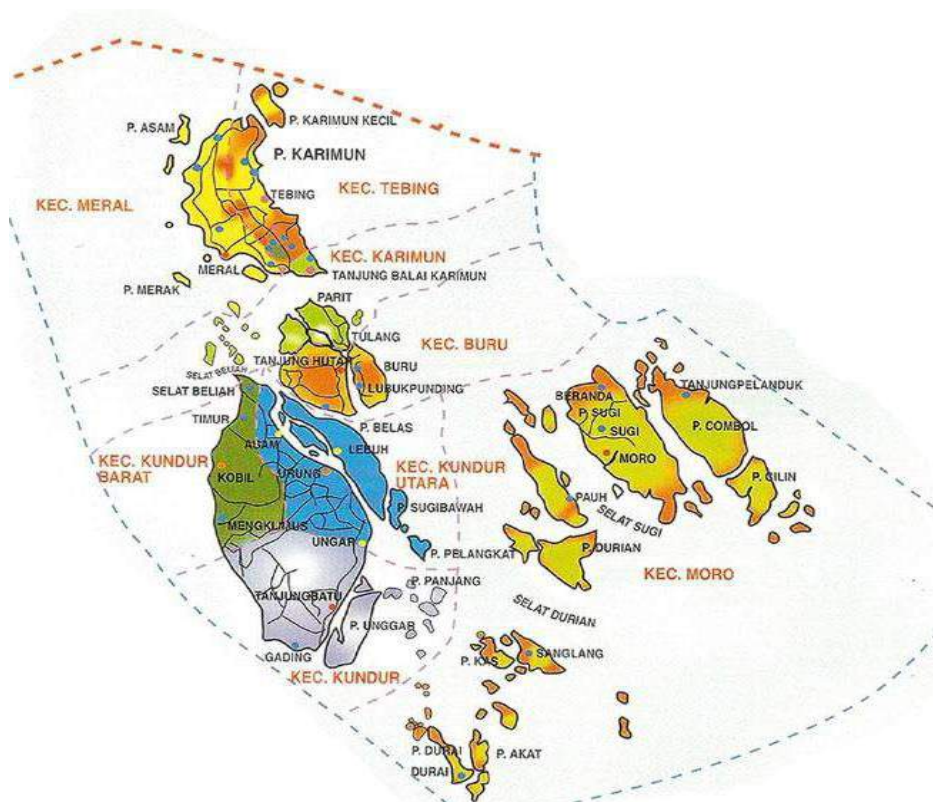
Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten dengan karakter wilayah kepulauan. Ibukota Kabupaten Karimun adalah Tanjungbalai Karimun, yang terletak di Pulau Karimun. Secara astronomis Kabupaten Karimun terletak pada 0°35' s.d. 1°10' Lintang Utara dan 103°30' s.d. 104° Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan ratusan pulau kecil. Saat ini terdapat 250 buah pulau, yang semuanya sudah bernama. Dari ratusan pulau tersebut, hanya 57 pulau saja yang berpenghuni. Terdapat dua pulau besar yang menjadi pusat permukiman dan sentra ekonomi, yakni Karimun dan Kundur (*Kabupaten Karimun dalam Angka*, 2015: 1).

Kabupaten Karimun merupakan wilayah Terdepan dan Terluar, yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia. Secara administratif, sebelah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sebelah timur dengan Kota Batam, sebelah selatan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Provinsi Riau), dan sebelah barat dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau). Luas wilayah Kabupaten Karimun secara keseluruhan adalah 7.984 km², yang terdiri dari daratan (1.524 km²) dan lautan (6.460 km²). Kabupaten ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan 71 desa/kelurahan. Adapun keduabelas kecamatan tersebut adalah: Moro, Durai, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar, Belat, Karimun, Buru, Meral, Tebing, Meral Barat (*Kabupaten Karimun dalam Angka*, 2015: 1-2, dan 6).

Secara topografis, wilayah pulau-pulau di Kabupaten Karimun berupa dataran rendah yang landai dengan ketinggian 2 s.d. 27 meter di atas permukaan laut. Namun terdapat pula bukit-bukit kecil. Di Pulau Karimun terdapat sebuah gunung bernama Gunung Jantan, dengan ketinggian hanya 478 meter di atas permukaan laut (*Kabupaten Karimun dalam Angka, 2015: 3*).

Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2014 mencapai 223.117 jiwa, yang terdiri dari 113.832 laki-laki dan 109.285 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 146 jiwa per km² (*Kabupaten Karimun dalam Angka, 2015: 47*).

Gambar 3.1
Kabupaten Karimun



(Sumber: *Kabupaten Karimun dalam Angka 2015: iii*)

Masyarakat Kabupaten Karimun sebagian besar merupakan etnis Melayu, sebagian lainnya adalah etnis Tionghoa dan para pendatang dari berbagai etnis di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2014, dari jumlah penduduknya yang mencapai 223.117 jiwa, sebanyak 152.970 jiwa atau 68,56% di antaranya adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dan merupakan penduduk usia kerja (*Kabupaten Karimun dalam Angka*, 2015: 53).

Berdasarkan lapangan kerjanya, sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun bekerja di sektor pertanian (23,94%) dan perdagangan (22,34%). Sebagian lainnya bekerja di sektor pertambangan (3,61%); industri (7,74%); listrik, gas, dan air (1,10%); konstruksi (14,10%); angkutan dan komunikasi (6,10%); keuangan (1,24%); dan jasa (19,84%.) (*Kabupaten Karimun dalam Angka*, 2015: 59).

B. Gambaran Masyarakat Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai posisi strategis karena berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Hal ini menyebabkan banyak penduduk yang merantau dan bekerja di kedua negara tersebut. Wilayah Kabupaten Karimun yang berdekatan dengan Pulau Sumatera menyebabkan kabupaten ini menjadi daerah transit antara penduduk dari Pulau Sumatera dengan penduduk dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, seperti: Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan lain-lain.

Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa pulau besar. Dalam Rencana Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten Karimun telah memetakan Pulau Kundur untuk daerah pertanian, Pulau Moro untuk daerah perikanan, Pulau Buru untuk pengembangan pariwisata, dan Pulau Karimun untuk pengembangan

industri. Meskipun demikian, pertanian tidak berkembang di Pulau Kundur karena masyarakat lebih memilih untuk bekerja ke Malaysia. Anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak lulusan SMA juga tidak mau melanjutkan pendidikan karena sudah merasa kehidupannya tercukupi dengan bekerja di Malaysia. Meskipun demikian, status mereka di Malaysia pada umumnya adalah pekerja ilegal. Mereka berangkat ke Malaysia dengan paspor pelancong dan sebulan sekali pulang kembali ke Karimun untuk memperpanjang paspor pelancong mereka.

Meskipun pertanian tidak berkembang di Pulau Kundur, secara keseluruhan sektor pertanian masih menjadi penyokong perekonomian Kabupaten Karimun. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun pada tahun 2014, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar kedua perekonomian Kabupaten Karimun, yakni 16,52%. Sektor pertanian ini di bawah sektor perdagangan.

Secara umum sektor pertanian dapat dikelompokkan ke dalam lima subsektor, yakni: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Di antara kelima subsektor pertanian tersebut, subsektor perikanan memberikan PDRB yang paling besar dibandingkan subsektor lainnya. Hal ini disebabkan kondisi geografis Kabupaten Karimun yang terdiri atas wilayah lautan yang cukup luas dan kaya akan potensi perikanan dan hasil laut lainnya (*Kabupaten Karimun dalam Angka, 2015: 151*).

Sektor industri pengolahan menempati urutan keempat dalam menyumbang perekonomian Kabupaten Karimun. Perkembangan di sektor industri mampu mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal, meningkatkan nilai tambah produk-produk asli daerah, serta menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2014, tercatat ada 184 unit usaha di Kecamatan Meral dengan tenaga kerja industri sebanyak 5.718 orang. Terjadi

peningkatan besar-besaran pada jumlah tenaga kerja industri di Kecamatan Meral karena unit usaha dengan skala besar (*Kabupaten Karimun dalam Angka*, 2015: 179-180).

Di Kabupaten Karimun terdapat banyak perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan galangan kapal, seperti Saipem, dan lain-lain. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan tersebut merekrut pekerja dari negara-negara lain, seperti: Korea Selatan, Malaysia, India, dan Filipina. Pekerja asal Kabupaten Karimun sendiri relatif hanya sedikit karena mereka tidak terdidik dan terlatih keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan-perusahaan asing. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun memang mengeluarkan sertifikat keterampilan di bidang industri, khususnya keterampilan mengelas. Namun sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut karena mereka mempunyai standar sertifikasi sendiri sesuai ISO.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, terdapat ribuan tenaga kerja asing dari berbagai negara yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing di Kabupaten Karimun. Berdasarkan asal negaranya, para pekerja asing tersebut berasal dari: Malaysia (45 orang), Singapura (23 orang), India (152 orang), Filipina (264 orang), Rumania (5 orang), Perancis (19 orang), Portugal (9 orang), Italia (66 orang), Rusia (2 orang), Afrika Selatan (11 orang), Kroasia (1 orang), Iran (1 orang), Thailand (578 orang), Mesir (2 orang), Myanmar (8 orang), Selandia Baru (1 orang), Kolumbia (1 orang), Belanda (1 orang), dan Australia (1 orang) (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, 2016).

Adapun perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Kabupaten Karimun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Nama Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Karimun

No	Nama Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja Asing
1.	PT. Saipem Indonesia	677
2.	PT. Karimun Sembawang Shipyard	11
3.	PT. Piacentini Turchi Indonesia	3
4.	PT. Trimegah Perkasa Utama	1
5.	PT. Bakti Tani Nusantara	7
6.	PT. Bukit Granit Mining Mandiri	4
7.	PT. Bukit Alam Persada	4
8.	PT. Elnindo Usaha Mandiri	3
9.	PT. Sredo	2
10.	PT. Wira Penta Kencana	1
11.	PT. Pacific Granitama	2
12.	PT. Karimun Granite	1
13.	PT. Multi Ocean Shipyard	2
14.	PT. Dharma Inti Bumi	8
15.	PT. Timah (KIP Mitra)	310
16.	PT. Sanhee Ina Jaya	10
17.	PT. Indian Oil Tanking	41
18.	PT. Anugerah Bahtera Mandiri	41
19.	PT. Gante Visi Mulia	5
20.	PT. Oil Tanking	5
21.	PT. M. Connel Dowell Indonesia	2
22.	PT. Karimun Mining	47
23.	PT. Ina Karya Utama	8
	Jumlah	1193

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun

Di Kabupaten Karimun, khususnya di Pulau Kundur, terdapat beberapa komunitas suku terasing yang disebut dengan Suku Laut, yakni: Prayun, Bubu, dan Waseng. Mereka adalah sebagian dari suku yang tinggal di pesisir pantai di berbagai wilayah di Kepulauan Riau. Mereka juga hidup berpindah-pindah dari pantai satu ke pantai yang lain. Sejarah mencatat bahwa suku Laut ini sudah ada dalam kurun waktu lima periode kekuasaan, yakni masa Batin

(kepala klan), Kesultanan Melaka-Johor dan Riau-Lingga, Pemerintah Kolonial Belanda (1911-1942), Pemerintah Kolonial Jepang (1942-1945), dan Republik Indonesia (1949-sekarang). Suku Laut pada masa lalu bagi para penguasa berperan untuk menjaga selat-selat, mengusir bajak laut, memandu para pedagang ke pelabuhan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor, dan mempertahankan hegemoni mereka di daerah tersebut (Chou, 2003: 25).

Mata pencaharian masyarakat suku Laut adalah nelayan, pemulung baik di daratan maupun besi tua dari kapal tambang, mencari siput laut yang biasa menempel di pohon, dan berburu. Berburu biasa dilakukan bersama keluarga dengan naik kapal pompong dalam waktu yang lama, kadang satu minggu sekali mereka baru kembali, dengan membawa hasil tangkapan berupa babi, biawak dan monyet. Bila mendapat banyak, hasil tangkapan ini akan langsung mereka jual; tetapi kalau hanya sedikit, akan mereka jadikan sebagai santapan bagi keluarganya. Karena mobilitas sosialnya yang tinggi ini, maka sulit bagi penduduk suku laut untuk bersekolah, karenanya banyak di antara mereka yang buta huruf.

Sistem kepercayaan yang dianut oleh Suku Laut adalah kepercayaan animisme. Dewasa ini sebagian dari mereka telah memeluk agama Islam, namun masih tetap mempertahankan kepercayaan nenek moyangnya. Orang-orang Suku Laut juga menganggap bahwa diri mereka adalah bagian dari masyarakat Melayu karena sehari-hari mereka berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Meskipun demikian, masyarakat Melayu pada umumnya tidak menerima mereka sebagai bagian dari suku Melayu. Hal ini disebabkan masyarakat Melayu beragama Islam dan harus melakukan beberapa syarat, seperti: sunat (bagi laki-laki), tidak memakan babi dan menenggak minuman beralkohol, menaati tata cara Islam dalam pemakaman, mengucapkan dua kalimat syahadat, kawin-cerai secara Islam, bersembahyang lima waktu

sehari secara Islam, membangun masjid di lingkungan kampung/desa, sholat pada dua hari raya Islam (Idul Fitri dan Idul Adha), sholat Jumat, menjalani puasa di bulan Ramadhan, memberi zakat, dan bila mampu melaksanakan ibadah haji (Chou, 2003:28).

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan program pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi penduduk Suku Laut. Rumah mereka sebelumnya terbuat dari kayu, berlantai tanah, beratap daun rumbia, tanpa MCK, dan penerangannya hanya menggunakan lampu minyak tanah. Rumah tersebut berukuran kecil, padahal digunakan untuk tempat berlindung seluruh anggota keluarga termasuk binatang peliharaannya.



Foto 1. Sebagian Rumah Kayu yang Ditempati Masyarakat Suku Laut
(Dok. Puslitjakdikbud, tanggal 4 Agustus 2016)

Pada program bantuan pemugaran RTLH, pemerintah membangun rumah berdinding batako, mempunyai MCK, dan sudah menggunakan listrik dari PLN.



Foto 2. Rumah-rumah Bantuan Program RTLH
(Dok. Puslitjakdikbud, tanggal 4 Agustus 2016)

Mereka relatif terisolir dari masyarakat Kabupaten Karimun pada umumnya. Hal ini menyebabkan mereka kurang mendapat akses pendidikan sebagaimana masyarakat Kabupaten Karimun lainnya. Menurut “*The Malay Peninsula and Archipelago 1511-1722*”, masyarakat Suku Laut menempati beberapa pulau di Provinsi Kepulauan Riau, antara lain Kepulauan Riau-Lingga, Pulau Tujuh, Kepulauan Batam, pesisir dan pulau-pulau di lepas pantai Sumatera Timur dan Semenanjung Malaya bagian selatan (“*The Malay Peninsula and Archipelago 1511–1722*” *The Encyclopedia of World History* 2001).

Secara historis masyarakat Suku Laut juga didiskreditkan karena dulunya dianggap sebagai perompak. Namun mereka juga dianggap berperan penting bagi kerajaan-kerajaan besar di Sumatera dan Malaka, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Mereka menjaga selat-selat, mengusir bajak laut, memandu para pedagang ke pelabuhan kerajaan-kerajaan tersebut, dan mempertahankan hegemoni mereka di daerah tersebut (Mary Somers Heidhues. *Southeast Asia: A*).

Pada tahun 2015, pemerintah mulai melakukan KTP-nisasi untuk seluruh warga Suku Laut, yang karena banyak warga yang buta huruf, mereka pun tidak mempunyai nama, selain nama panggilan dan tidak mengetahui tanggal lahirnya.

Komunitas Suku Laut ini beberapa tahun yang lalu belum tersentuh program pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, PKBM Bakti Negeri juga membuat program pendidikan dalam bentuk paket. Pada komunitas Suku Laut di Desa Teluk Sitimbul, mereka pada umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan. Sebagian besar sudah mapan secara ekonomi karena tercukupi dari hasil laut. Meskipun demikian, banyak anggota masyarakatnya yang masih buta huruf, sehingga tidak dapat mengetahui informasi melalui teks-teks tertulis.

C. Penyelenggaraan Program-Program PKBM di Kabupaten Karimun

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, terdapat 22 PKBM yang tersebar di berbagai kecamatan di beberapa pulau. Adapun ke-22 PKBM tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.2
Nama dan Alamat PKBM Kabupaten Karimun**

No.	Nama PKBM	Alamat
1.	Tunas Bangsa	Jl. A. Yani Gg. Awang Noor Baran II
2.	Melur	Jl. Tg. Tempinis No. 15 RT 01 RW 04, Dusun II, Desa Selat Mendaun, Kec. Karimun
3.	Cahaya Kuba	Jl. Pendidikan Layang Kobel, Kec. Kundur Barat
4.	Usaha Kita	Jl. Letjend. Suprpto RT 02/03, Desa Pangke Barat Kec. Mera Barat
5.	Al-Himmah	Parit Lapis

6.	Permata Aira	Jl. Paya Togok Lap. Bola Glora, Tanjung Batu Kota Kec. Kundur
7.	Sanglar Mandiri	Desa Sanglar, Kec. Durai
8.	Moro Mandiri	Desa Jang, RT 01, RW 02, Kec. Moro
9.	Sinar Bangsa	Simpang Tiga Jelutung, Desa Teluk Setimbul, Kec. Kundur Barat
10.	Al-Amin	Jl. M,T. Haryono, RT 02, RW 02, Kec. Tebing
11.	Akbar	Jl. Letjend Suprpto, Parit Benut Atas, RT 01, RW 04, Kel. Parit Benut, Kec. Meral
12.	Matahari	Tarempak, Jl. Lembah Permai, RT 02, RW 02, Desa Darussalam
13.	Melati	Jl. Trikora No. 75, Tanjung Balai Karimun
14.	Al-Falah	Jl. Besar Sawang, Prayun, Desa Mata Air, Kec. Kundur Barat
15.	Bakti Negeri	Jl. Besar Kobel, Sawang Laut, Kec. Kundur Barat
16.	Al-Ubudiyah	Wonosari RT 02, RW 09, Kel. Baran, Kec. Meral
17.	Harum Sari	Jl. Bangun Sari, RT 02, RW 03, Kel. Harjosari
18.	Bina Taqwa	Jl. SMP Muhammadiyah, RT 05, RW 03, Kel. Sungai Lakam Barat
19.	Mitra Mandiri	Jl. Brigjend Katamso, RT 03, RW 02, Desa Pongkar, Kec. Tebing
20.	Cempaka	Jl. Ling Beringin, RT 01, RW 03, Kel. Buru
21.	Karimun Pertiwi	Kompleks Telaga Mas, Kec. Karimun
22.	Fajar Kundur	Jl. Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Kel. Gading Sari.

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun)

Hampir semua PKBM di Kabupaten Karimun tersebut menyelenggarakan program PAUD, keaksaraan, berupa Keaksaraan Fungsional dan Keaksaraan Usaha Mandiri; kesetaraan, meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C; keterampilan (*life skill*), Taman Bacaan Masyarakat, dan Kewirausahaan. Selain itu PKBM-PKBM tersebut juga menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk masyarakat suku terasing.

Peserta program Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Karimun pada tahun 2008 sebanyak 300 orang. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 604

orang (*Kabupaten Karimun dalam Angka*, 2015: 59). Paket Kesetaraan di PKBM-PKBM Kabupaten Karimun pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat yang putus sekolah dengan usia di atas 20 tahun. Namun kenyataannya terdapat anak-anak putus sekolah yang disebabkan bermasalah di sekolah (misalnya: kenakalan anak, anak sulit menerima pelajaran, hubungan yang tidak harmonis antara anak dan guru). Sebagai catatan, anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Karimun bukan disebabkan oleh kemiskinan, karena pemerintah telah menerapkan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menengah. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun membuat kebijakan mereka yang putus sekolah dalam kisaran umur 15-16 tahun diterima di Kesetaraan paket A.

Di bawah ini diuraikan kegiatan dari beberapa PKBM di Kabupaten Karimun, sehingga dapat diperoleh gambaran program-program kegiatan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan keberadaan PKBM-PKBM tersebut.

1. PKBM Bakti Negeri

PKBM Bakti Negeri terletak di Kecamatan Kundur Barat, di Pulau Kundur. Pulau Kundur merupakan salah satu pulau besar di Kabupaten Karimun, selain Pulau Karimun. Untuk mencapai pulau ini hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit perjalanan kapal cepat dari Pulau Karimun. PKBM Bakti Negeri mempunyai beberapa program, yakni: Keaksaraan Fungsional, Keaksaraan Usaha Mandiri, Paket A, Paket B, Taman Bacaan Masyarakat, Kelompok Bermain, tiga jenis *life skill* (meliputi: operator komputer, teknik budi daya lele, dan keterampilan); dua kewirausahaan (meliputi kantin dan budi daya lele), serta tiga program inklusi kepada masyarakat Suku Laut yang dilakukan di Kampung Bubu (Kecamatan

Kundur Barat), Waseng (Kecamatan Kundur Utara), dan Prayun (Kecamatan Kundur Utara).

Program *life skill* operator komputer diikuti oleh 43 warga belajar, teknik budi daya lele diikuti oleh 25 warga belajar, dan keterampilan diikuti oleh 41 warga belajar. Adapun program inklusi pada masyarakat Suku Laut diikuti oleh 80 warga (Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, 2016). Untuk menambah pendapatan, yang hasilnya dapat dipakai untuk membeli alat tulis kantor untuk pembelajaran, PKBM Bakti Negeri membuka kantin Cik Qila Intan Payung. Salah satu menu andalannya adalah laksa. Makanan yang terbuat dari sagu ini biasa disuguhkan kepada tutor yang akan mengajar di PKBM tersebut.



Foto 3. Laksa, Makanan yang Ditawarkan di Kantin Cik Qila Intan Payung (Dok. Puslitjakdikbud)

Menurut Kahlil, Ketua PKBM Bakti Negeri, Pulau Kundur mempunyai potensi di bidang pertanian, perindustrian, dan perikanan. Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani, wiraswasta, dan buruh di perusahaan-perusahaan. Warga belajar yang mengikuti program-program PKBM pada umumnya digunakan untuk mencari status sosial dan untuk memperoleh ijazah untuk mencari pekerjaan. Khususnya pada masyarakat Suku Laut yang masih banyak yang buta aksara, program keaksaraan

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung (calistung) dan bersosialisasi dengan masyarakat di luar Suku Laut. Meskipun demikian, pengelola PKBM Bakti Negeri masih merasakan beberapa kendala, antara lain: (1) tenaga tutor masih mengandalkan guru-guru sekolah formal; (2) operasional PKBM yang masih belum memadai; (3) kendala geografis untuk menjangkau seluruh masyarakat karena wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau.

2. PKBM Moro Mandiri

PKBM Moro Mandiri terletak di ibukota Kecamatan Moro di Pulau Moro. Pulau ini dapat ditempuh dalam waktu 45 menit dari Tanjung Balai Karimun, Pulau Karimun dengan menggunakan kapal cepat. Secara geografis Kecamatan Moro terdiri dari 87 pulau yang keseluruhannya telah diberi nama. Namun dari 87 pulau tersebut hanya 19 pulau yang berpenghuni. Salah satunya adalah Pulau Jang yang dapat ditempuh hanya 7 menit dengan perahu motor tempel dari Pulau Moro.



Foto 4. Sekretariat PKBM Moro Mandiri di Pulau Moro, Menempati Salah Satu Ruang dari Bekas Kantor Kecamatan Moro (Dok. Puslitjakdikbud)



Foto 5. Perahu-perahu Motor Tempel untuk Penyeberangan antara Pulau Moro (Sebagai Pulau Induk) dengan Pulau-Pulau Kecil Lainnya (Dok. Puslitjakdikbud)

PKBM Moro Mandiri mempunyai beberapa program, yakni: PAUD, keaksaraan, kesetaraan Paket B dan C, dan Taman Bacaan Masyarakat. Peserta didik PKBM Moro Mandiri di Pulau Jang mempunyai usaha *home industry* kerupuk Moro, yakni kerupuk yang terbuat dari ikan tenggiri. Industri ini dikerjakan oleh ibu-ibu di Pulau Jang. Mereka mencampur 20 kg ikan tenggiri dengan tepung sagu 20 kg. Ikan tenggiri diperoleh dari para nelayan yang menyetorkan ikan tenggiri ke tempat *home industry*, sementara tepung sagu dibeli dari Pulau Karimun.

Menurut Zulkifli, Ketua PKBM Moro Mandiri, Pulau Moro dan pulau-pulau sekitarnya mempunyai potensi bahan galian, namun belum dikelola dengan baik. Sementara itu masyarakatnya pada umumnya bekerja sebagai nelayan.



Foto 6. Pembuatan Kerupuk Ikan Tenggiri oleh Ibu-ibu di Pulau Jang, Kecamatan Moro (Dok. Puslitjaldikbud)

3. PKBM Mitra Mandiri

PKBM Mitra Mandiri terletak di Kecamatan Tebing di Pulau Karimun. PKBM ini mempunyai beberapa program, yakni: Keaksaraan Fungsional, Kelompok Bermain, Paket A, Paket B, Paket C, Taman Bacaan Masyarakat, dan *life skill* (meliputi: Bahasa Inggris, menjahit, komputer, kecantikan, dan pendidikan agama) (Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, 2016).



Foto 7. Papan Nama di Depan PKBM Mitra Mandiri (Dok. Puslitjaldikbud)

Menurut Razali, ketua PKBM Mitra Mandiri, Pulau Karimun memiliki potensi alam berupa pertambangan dan pariwisata. Di samping itu, di pulau ini terdapat banyak perusahaan asing yang menyerap banyak lapangan pekerjaan. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat, terutama generasi mudanya, yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Kehadiran perusahaan-perusahaan asing tersebut juga menyebabkan perekonomian Kota Tanjungbalai Karimun mejadi lebih hidup. Banyak orang yang kemudian berdagang karena banyaknya permintaan barang kebutuhan sehari-hari. Yang menarik, banyak warga belajar di PKBM ini yang bertujuan untuk memperoleh ijazah, karena ijazah tersebut akan digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan asing. Meskipun demikian, penyelenggara PKBM tidak mempersoalkan hal tersebut karena dengan mengikuti program kesetaraan di PKBM, pola pikir mereka menjadi sedikit lebih maju. Menurutnya, kendala yang dihadapi dalam mengelola PKBM Mitra Mandiri adalah kurang sarana prasarana dan tidak ada dana operasional lembaga.¹

4. PKBM Al Himmah

PKBM Al Himmah terletak di Kecamatan Meral, Pulau Karimun. PKBM ini menyatu dengan Pondok Pesantren Al Falah, sehingga ruang-ruang untuk kegiatan belajar mengajar menggunakan kelas-kelas di pondok pesantren tersebut. Salah satu program KUM di PKBM ini adalah membuat sayuran hidroponik. Meskipun demikian, pemasaran sayuran tersebut masih sulit karena terbatasnya pedagang yang mau membeli sayuran mereka.

Masyarakat di sekitar PKBM ini, untuk generasi tuanya pada umumnya bekerja sebagai petani, sedangkan generasi mudanya bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Generasi muda enggan untuk bertani karena dengan

bekerja di perusahaan, mereka memperoleh gaji yang lumayan besar. Mereka yang bekerja di perusahaan pada umumnya dituntut mempunyai ijazah SMA untuk kenaikan pangkat. Hal ini yang mendorong mereka untuk mengambil program kesetaraan Paket C. Yang menarik, PKBM ini juga mempunyai program kesetaraan Paket B dengan warga belajar para narapidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan banyak narapidana yang ternyata tidak lulus SMP, dan mereka memanfaatkan hari-harinya di penjara dengan mengikuti program Paket B tersebut. Kendala yang dialami oleh PKBM ini adalah minimnya dana yang diperoleh untuk pembiayaan PKBM, sehingga banyak program yang tidak dapat berjalan dengan maksimal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PKBM

DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak merupakan salah satu dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Ibukota kabupaten ini adalah Rangkasbitung. Secara astronomis wilayah kabupaten ini terletak pada 105°25'-106°30' Bujur Timur dan 6°18'-7°00' Lintang Selatan. Secara administratif, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang; sebelah timur dengan Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten), Bogor, dan Sukabumi (Provinsi Jawa Barat); sebelah selatan dengan Samudera Indonesia; dan sebelah barat dengan Kabupaten Pandeglang. Secara geografis Kabupaten Lebak merupakan dataran rendah di wilayah selatan, dataran sedang untuk wilayah tengah dan utara, dan pegunungan di wilayah timur. Luas wilayah Kabupaten Lebak mencapai 3.044,72 km², yang terbagi atas 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan (*Kabupaten Lebak dalam Angka*, 2016: 3). Jumlah penduduk Kabupaten Lebak mencapai 1.269.812 jiwa, yang terdiri dari wanita 650.912 jiwa dan pria 618.900 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 417 jiwa tiap km² (*Kabupaten Lebak dalam Angka*, 2016: 43-44).

Kabupaten Lebak dibagi menjadi empat wilayah pembangunan, yakni: Lebak Utara, Lebak Selatan, Lebak Timur, dan Lebak Barat. Wilayah pembangunan Lebak Utara meliputi Kecamatan Rangkasbitung, Warunggunung, Cikulur, Cimarga, Maja, Curugbitung, dan Kalanganyar. Wilayah ini ditujukan sebagai wilayah perdagangan dan industri, baik industri hulu maupun industri hilir. Dalam hal ini diharapkan pula sebagai industri pengolahan hasil-hasil pertanian.

Wilayah pembangunan Lebak Selatan meliputi Kecamatan Malingping, Wanasalam, Cijaku, Panggarangan, Bayah, Ciligrang, Cibeber, Cigemblong, dan Cihara. Wilayah ini mempunyai karakteristik yang unik, yakni sebagian merupakan daerah pegunungan (Gunung Gede dan Gunung Sanggabuana) dan sebagian merupakan daerah berpantai. Wilayah ini diperuntukkan sebagai wilayah pembangunan yang berpotensi di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan laut, pertambangan, dan pariwisata.

Wilayah pembangunan Lebak Timur meliputi: Kecamatan Cipanas, Muncang, Sobang, Sajira, Leuwidamar, Bojongmanik, Lebakgedong, dan Cirinten. Wilayah ini merupakan daerah perbukitan di Pegunungan Kendeng sehingga baik untuk perkebunan kecil dan perkebunan besar.

Wilayah pembangunan Lebak Barat meliputi: Kecamatan Banjarsari, Gunungkencana, dan Cileles. Wilayah ini masih memiliki hutan lindung. Dengan kontur tanah yang ada, wilayah ini baik untuk perkebunan besar dan kecil (*Kabupaten Lebak dalam Angka*, 2016: 9-10).

Gambar 4.1

Kabupaten Lebak



Masyarakat Kabupaten Lebak sebagian besar merupakan etnis Sunda. Dari jumlah penduduknya yang mencapai 1.269.812 jiwa, sebanyak 871.648 jiwa di antaranya adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dan merupakan penduduk usia kerja. Dari penduduk usia kerja tersebut, jumlah pengangguran mencapai 60.209 jiwa atau 12,03% (*Kabupaten Lebak dalam Angka*, 2016: 54).

Berdasarkan lapangan kerjanya, sebagian besar masyarakat Kabupaten Lebak yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, yakni 181.392 orang (36,27%); sebagian lainnya bekerja di sektor industri 31.418 orang (6,28%); perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi 111.615 orang (22,32%); jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan 70.230 orang (14,04%); dan sektor lainnya 105.520 (21,09%) (*Kabupaten Lebak dalam Angka*, 2016: 55). Di sektor perkebunan, tanaman yang banyak dibudidayakan, meliputi: cengkeh, enau, jambu mete, jarak, kakao, kapuk, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, melinjo, pandan, dan teh (*Kabupaten Lebak dalam Angka*, 2016: 159).

B. Gambaran Masyarakat Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak mempunyai PAD kecil, yakni hanya Rp2.234 Triliun, sehingga dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal (*Kabupaten Lebak, Realisasi PAD Lampau Rp 2.234 Triliun*. Senin, 11/01/2016. <http://www.neraca.co.id/article/63957/kabupaten-lebak-realisasi-pad-lampau-rp2234-triliun>, diunduh tanggal 4 Oktober 2016). Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Lebak mempunyai keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan. Perekonomian masyarakat Kabupaten Lebak juga relatif kurang baik, sehingga berdampak pada kesadaran para orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya yang masih rendah.

Kabupaten Lebak memiliki banyak perkebunan. Hampir seperempat dari wilayah kabupaten ini merupakan areal perkebunan. Banyaknya masyarakat yang bekerja di perkebunan menyebabkan sebagian anak-anak usia sekolah juga membantu orangtuanya bekerja di perkebunan. Hal ini menyebabkan jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Lebak cukup tinggi, terbukti dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk Nasional masih di bawah rata-rata 60%.

Menurut pernyataan Bupati Lebak, Ity Octavia Jayabaya, ada beberapa faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Lebak, yakni: pertama faktor kemiskinan keluarga; kedua faktor kultur masyarakat, karena banyak anak-anak usia sekolah yang harus bekerja atau menikah; ketiga letak geografis Kabupaten Lebak dengan pegunungan serta perbukitan; dan keempat terbatasnya sarana pendidikan. Pada faktor kultur masyarakat, pada masyarakat Suku Baduy, secara budaya mereka menolak pendidikan dengan alasan bertentangan dengan budaya mereka (*Antisipasi Siswa Putus Sekolah, Bupati Lebak Beri Bantuan*. 31 Agustus 2014. <http://rimanews.com/budaya/pendidikan/read/20140831/170741/> Antisipasi-Siswa-Putus-Sekolah-Bupati-Lebak-Beri-Bantuan, diunduh tanggal 5 Oktober 2016). Anak putus sekolah lebih banyak terjadi pada anak perempuan karena ada anggapan, anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena akhirnya mengurus dapur juga.

Sebagaimana disampaikan di atas, perekonomian di Kabupaten Lebak relatif masih kurang baik. Hal ini juga ditandai dengan masih tingginya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Iman Solichudin, dalam sejarahnya masyarakat Lebak telah berabad-abad menjadi masyarakat yang miskin dan menderita. Sejarah kemiskinan masyarakat Lebak sudah dituliskan oleh Multatuli, seorang penulis berkebangsaan Belanda yang bernama asli Eduard Douwes Dekker, pada tahun 1850-an. Ia menuliskan

secara konkret cengkeraman kemiskinan pada masyarakat Lebak yang dinilainya disertai dengan cekikan penindasan. Ironisnya, hingga hampir dua abad setelah Multatuli melukiskan kondisi masyarakat Lebak, hingga sekarang Kabupaten Lebak masih ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal dan ditetapkan sebagai Daerah Binaan oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dari 340 desa di Kabupaten Lebak, 148 di antaranya termasuk kategori desa tertinggal. Iman Solichudin juga menambahkan bahwa kemiskinan pada masyarakat Lebak tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal, yakni mentalitas orang miskin itu sendiri yang telah turut memberi sumbangan pada persoalan langgengnya kemiskinan Lebak (Solichudin, 2010).

Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat diketahui berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tersebut diperoleh berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang meliputi tiga indikator, yakni: harapan hidup, pendidikan, dan daya beli. Berdasarkan analisis dari ketiga indikator tersebut, memang telah terjadi peningkatan IPM pada masyarakat Kabupaten Lebak. Jika pada tahun 2004 s.d. 2008 IPM Kabupaten Lebak hanya 67,04%, maka pada tahun 2009 s.d. 2014 meningkat menjadi 68,84%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lebak telah terjadi peningkatan pada kesehatan masyarakat (indikator harapan hidup), melek huruf (indikator pendidikan), dan keterampilan, kesempatan kerja, dan pendapatan (indikator daya beli) (Solichudin, 2010).

Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, jumlah desa tertinggal sedikit demi sedikit semakin berkurang. Pada tahun 2004 masih terdapat 190 desa tertinggal, dan pada tahun 2010 menjadi hanya 112 desa. Pada tahun 2008, dari 324.378 KK terdapat 171.109 KK atau 52,75% yang masih tergolong miskin. Persentase kemiskinan terutama terkonsentrasi di wilayah tengah, yang meliputi Kecamatan Leuwidamar,

Muncang, dan Sobang, di mana persentase kemiskinannya masih di atas 60%. Hal ini disebabkan wilayah topografinya yang berbukit-bukit, merupakan kawasan hutan, serta kurangnya aksesibilitas jalan, kurangnya sarana informasi dan telekomunikasi, dan lokasinya yang kurang strategis (Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu, 2016: 1-2). Sampai dengan tahun 2014 persentase jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Lebak masih mencapai 11,25% dan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 5,94% (*Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014*. Rangkasbitung: Pemerintah Kabupaten Lebak: I-16).

Secara umum masyarakat Kabupaten Lebak dapat menerima hal-hal yang menunjang pembangunan ekonomi, termasuk di antaranya investasi dan penanaman modal dari dalam maupun luar negeri, dengan persyaratan mereka dilibatkan dalam menjalankan kegiatan. Masyarakat juga mempunyai potensi komoditas industri kecil dan kerajinan. Komoditas industri kecil, antara lain: gula aren, emping melinjo, selai pisang, tahu tempe, batu bata, genteng, dan lain-lain. Komoditas kerajinan, antara lain: tikar pandan, anyaman bambu, pande besi, batu fosil, kulit imitasi, dan lain-lain. Kabupaten Lebak juga kaya akan perkebunan, seperti: karet, kelapa, kelapa sawit, kelapa hibrida, kakao, kopi robusta, aren, cengkeh, lada, pandan, teh, jambu mete, fanili, jarak pagar, kapuk, dan lain-lain. Selain potensi perkebunan, wilayah selatan Kabupaten Lebak juga potensial di bidang perikanan, yakni potensi lestari untuk perikanan pantai sebesar 3.712,4 ton/tahun dan potensi ZEE sebesar 6.884,84 ton/tahun (Sejarah terbentuknya Lebak <http://iemaes.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-terbentuknya-lebak.html>, diunduh tanggal 21 September 2016).

Sebagaimana disampaikan di atas, berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kabupaten Lebak termasuk salah satu wilayah tertinggal. Salah satu indikasi sebagai wilayah

tertinggal adalah banyaknya warga yang masih buta huruf. Pada tahun 2010 jumlah warga berusia 12-45 tahun yang masih buta huruf mencapai 1.813 jiwa. Mereka tersebar di 28 kecamatan, terbanyak di Kecamatan Cimarga (278 orang), Cibadak (217 orang), dan Maja (217 orang). Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak berencana menuntaskan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional (KF) dengan melibatkan unsur Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan organisasi keagamaan. Tingginya angka buta aksara tersebut disebabkan oleh faktor budaya masyarakat yang masih kurang perhatian terhadap pendidikan, kemiskinan, dan terbatasnya sarana prasarana pendidikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil (*Warga Lebak Penyandang Buta Huruf Capai Ribuan, Rabu, 2 Juni 2010*, <http://www.antarabanten.com/berita/13165/warga-lebak-penyandang-buta-huruf-capai-ribuan>, diunduh tanggal 14 September 2016).

Di Kabupaten Lebak juga dikenal memiliki komunitas adat terpencil yang disebut Baduy. Masyarakat Baduy yang masih hidup bersahaja dan relatif mengisolasi diri dari masyarakat luar. Mereka disebut juga Urang Kanekes atau orang Kanekes. Disebut demikian karena komunitas ini tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, dengan populasi sekitar 8 ribuan orang. Sebagaimana komunitas adat terpencil lainnya di Indonesia, masyarakat Baduy juga menolak pendidikan formal di sekolah-sekolah untuk anak-anak mereka (*Urang Kanekes*. https://id.wikipedia.org/wiki/Urang_Kanekes, diunduh tanggal 27 Agustus 2016).

Masyarakat Baduy tidak mengenal pendidikan formal karena dianggap berlawanan dengan adat-istiadat mereka. Mereka bahkan menolak kebijakan pemerintah untuk membangun sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini pemerintah belum mampu mengubah pandangan hidup mereka untuk

menerima pembangunan sekolah di wilayah mereka, orang Baduy masih menolak usaha pemerintah tersebut. Akibatnya, mayoritas orang Baduy tidak dapat membaca atau menulis. Meskipun demikian, terdapat pula kelompok-kelompok masyarakat Baduy yang diam-diam mengusahakan pendidikan untuk anak-anaknya. Untuk memperoleh pendidikan, anak-anak mereka belajar melalui paket-paket program keaksaraan dan kesetaraan yang diselenggarakan PKBM (salah satunya adalah PKBM Kencana Ungu).

Masyarakat Baduy secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu *tangtu*, *panamping*, dan *dangka*. Kelompok *tangtu* adalah kelompok yang dikenal sebagai Baduy Dalam (Kaneke Dalam) yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di tiga kampung: Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Ciri khas Orang Kaneke Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua (warna tarum) serta memakai ikat kepala putih. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing.

Warga Baduy Dalam masih memegang teguh adat-istiadat nenek moyang mereka. Sebagian peraturan yang dianut oleh suku Kaneke Dalam antara lain:

1. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi;
2. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki;
3. Pintu rumah harus menghadap ke utara/selatan (kecuali rumah sang *pu'un* atau ketua adat);
4. Larangan menggunakan alat elektronik (teknologi);
5. Menggunakan kain berwarna hitam/putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern.

Kelompok masyarakat kedua yang disebut *panamping* adalah mereka yang dikenal sebagai Baduy Luar (Kanekes Luar), yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Baduy Dalam, seperti Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna biru gelap (warna tarum).

Kelompok Baduy Luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Baduy Dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Baduy Dalam ke Baduy Luar, yakni:

1. Mereka telah melanggar adat masyarakat Baduy Dalam;
2. Berkeinginan untuk keluar dari Baduy Dalam;
3. Menikah dengan anggota Baduy Luar.

Ciri-ciri masyarakat orang Baduy Luar:

1. Mereka telah mengenal teknologi, seperti peralatan elektronik;
2. Proses pembangunan rumah penduduk Baduy Luar telah menggunakan alat-alat bantu, seperti gergaji, palu, paku, dan lain-lain, yang sebelumnya dilarang oleh adat Baduy Dalam;
3. Menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua (untuk laki-laki), yang menandakan bahwa mereka tidak suci. Kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana jeans;
4. Menggunakan peralatan rumah tangga modern, seperti kasur, bantal, piring, dan gelas kaca atau plastic;
5. Mereka tinggal di luar wilayah Baduy Dalam;
6. Sebagian di antara mereka telah terpengaruh dan berpindah agama menjadi seorang muslim dalam jumlah cukup signifikan.

Apabila Baduy Dalam dan Baduy Luar tinggal di wilayah Kanekes, maka "Baduy Dangka" tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal dua kampung yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam *buffer zone* atas pengaruh dari luar (Permana, 2001).

Mata pencaharian masyarakat Baduy adalah petani padi huma. Selain itu mereka juga memetik hasil-hasil hutan, seperti durian, asam keranji, dan madu hutan. Masyarakat Baduy luar juga berinteraksi dengan masyarakat luar, terutama dalam sewa-menyewa tanah dan menjadi buruh tani. Pada saat pekerjaan di ladang tidak terlalu banyak, orang Baduy juga berjualan ke kota-kota besar sekitar wilayah mereka dengan syarat harus berjalan kaki. Pada umumnya mereka pergi dalam rombongan kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, berkunjung ke rumah kenalan yang pernah datang ke Kanekes sambil menjual madu dan hasil kerajinan tangan. Dalam kunjungan tersebut biasanya mereka mendapatkan tambahan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup (Gama, 1993).

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas menuju komunitas masyarakat Baduy, Pemerintah Kabupaten Lebak pernah bermaksud membangun infrastruktur jalan ke Baduy Dalam dari Ciboleger ke Cibeo dan Cikartawana. Tetapi masyarakat Baduy menolaknya. Mereka juga menolak pembangunan fasilitas MCK. Pemerintah kabupaten juga pernah menawarkan untuk membangun sekolah di dekat permukiman Baduy), tapi juga ditolak oleh mereka. Jadi, pendidikan hanya dapat masuk melalui jalur nonformal, khususnya PKBM.

C. Penyelenggaraan Program-Program PKBM di Kabupaten Lebak

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, terdapat 46 PKBM yang tersebar di berbagai kecamatan. Adapun ke-46 PKBM tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1**Nama dan Alamat PKBM Kabupaten Lebak**

No.	Nama PKBM	Alamat
1.	Daar El Karim	Jl. Raya Bayah-Malingping km 7, Kec. Malingping
2.	Karya Muda	Kp. Cimangpang, Kec. Panggarangan
3.	Taktakan Jagat	Kp. Tenjo Laut, RT 01, RW 01, Bayah
4.	Gurita Selatan	Kec. Bayah
5.	Al-Zahrah	Jl. Raya Cibeber, km 1, Kp. Ciherang, Kec. Cibeber
6.	Budi Utomo	Kec. Cibeber
7.	Dzikri Mandiri	Jl. Raya Cikotok, RT 02, RW 03, Cikotok, Kec. Cibeber
8.	Wiata Bakti	Jl. Malingping-Pasirnangka km 14, Warunguyu, Kp. Cimanggu, Ds. Sukasenang, Kec. Cijaku.
9.	Harapan Bangsa	Jl. Raya Saketi Malingping km 20, Kp. Ciseda, Ds. Bojongjuruh, Kec. Banjarsari
10.	Lestari	Jl. Raya Cileles-Gunungkencana km 6, Kec. Cileles
11.	Mekar Jaya	Kp. Kadu Batara, Kec. Gunungkencana
12.	Berdikari	Jl. Raya Bojongmanik km 4, Kp. Pajagan, Ds. Cimayang, Kec. Bojongmanik
13.	Pelangi Ilmu	Jl. Posko-Cileles, Kp. Kadulari, Ds. Harjawana, Kec. Bojongmanik
14.	Saluyu	Kp. Songhak, Ds. Bojongmanik, Kec. Bojongmanik
15.	Harapan Mulya	Jl. Raya Leuwidamar, Kp. Bunt, Ds. Cisimeut Raya, Kec. Leuwidamar
16.	Kencana Ungu	Kp. Dukuh, Ds. Leuwidamar, Kec. Leuwidamar
17.	Bina Insani	Kp. Babagan Padik RT 01/ RW 04, Ds. Sukanegara, Kec. Muncang
18.	Bina Warga	Kp. Ciminyak, Ds. Ciminyak, Kec. Muncang
19.	Giri Asih	Kp. Cigebrok, Ds. Giriharja, Kec. Cipanas
20.	Bestari Kusuma	Kp. Cianyar, Ds. Ciuyah, Kec. Sajira

No.	Nama PKBM	Alamat
21.	Nurul Iman	Jl. Raya Cipanas km. 10, BTN Korpri Blok G 2 no. 18, Ds. Ciuyah, Kec. Sajira
22.	Sabakinkin	Jl. Kopo Maja Tigaraksa, Kp. Cisonggom, Ds. Parungsari, Kec. Sajira
23.	Nubalarea	Jl. Raya Sampay Cileles, Ds. Sumurbandung, Kec. Cikulur.
24.	Pangayom	Jl. Cibuah Parage km. 4, Ds. Parage, Kec. Cikulur.
25.	Sahabat	Kp. Ladang Kuray Taji, Kec. Cikulur
26.	Bina Hikmah	Jl. Raya Rangkasbitung-Pandeglang km 9, Ds. Selaraja, Kec. Warunggunung
27.	Budi Luhur	Kec. Warunggunung
28.	Jaya Mandiri	Jl. Raya Pandeglang km. 9, Kp. Kolelet RT 01/ RW 02, Ds. Pasirtangkil, Kec. Warunggunung.
29.	Al Zazirah	Ds. Mekar Agung, Kec Cibadak
30.	Budi Mulya	Jl. Raya Danda Kusuma II, Kp. Peujeh, Kec. Cibadak
31.	Harapan	Jl. Pendidikan, Kec. Cibadak
32.	Nurul Palah Bani Hadi	Jl. Arief Rahman Hakim, Kp. Kamantren RT 01, RW 01, Ds. Cimenteng, Kec. Cibadak
33.	Al Ishlah	Jl. Kuncoro Jakti km 3, Kec. Rangkasbitung
34.	Budi Mulya	Kp. Barangbang RT 03, RW 13, Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung
35.	Rabit	Jl. Siliwangi, Kp. Palaton No. 5, RT 02/ RW 012, Kec. Rangkasbitung
36.	Wibana	Kp. Pasirangka RT 01/ RW 06, Ds. Pasirtanjung, Kec. Rangkasbitung
37.	Mandiri	Jl. Maja Koleang km 11, Kp. Cilayang, Ds. Cilayang, Kec. Curugbitung.
38.	Asuh Warga	Jl. Raya Simpang Binuangen, km. 9, Kp. Sukatani, Ds. Sukatani, Kec. Wanasalam
39.	Cundamani	Kp. Sedekan RT 03/ RW 03, Ds. Cihara, Kec. Cihara
40.	Surya Bahari	Kp. Pasirangka, Ds. Ciparahu, Kec. Cihara
41.	Al Kalam	Kp. Cihaladan RT 02/ RW 06, Ds. Badur, Kec. Cirinten

No.	Nama PKBM	Alamat
42.	Kujang Sastra Manggala Jaya	Jl. Datarcae km 1, Kp. Babakan Pamatang Sireum, Ds. Datarcae, Kece. Cirinten
43.	Rido Manah	Kp. Gunung Julang, Kec. Lebak Gedong
44.	Hati Nurani	Jl. Tapen, Kp. Leuweung Lojor, Ds. Kalanganyar, Kec. Kalanganyar
45.	Karya Pribumi	
46.	Insan Cendikia	Kp. Cinagoler, RT 01/ RW 06

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak 2016.*

Di Kabupaten Lebak, peserta Paket A relatif sudah sedikit, tapi Paket B dan Paket C masih banyak. Warga belajar Kabupaten Lebak yang mengikuti program Paket A saat ini hanya 83 orang (sebagian besar adalah masyarakat Baduy di Kecamatan Leuwidamar), namun Paket B mencapai 938 orang, dan Paket C 1.019 orang (*Kabupaten Lebak dalam Angka, 2016:78*). Mereka mengikuti program Paket B dan Paket C dengan kesadaran sendiri, tidak dipaksa. Banyak peserta Paket C yang menggunakan ijazah yang diperolehnya untuk kepentingan politik, seperti mencalonkan diri sebagai kepala desa dan anggota legislatif, dan ada pula yang untuk bekerja di pabrik. Bahkan Bupati Lebak periode sebelumnya, Jayabaya, adalah lulusan program Paket C dari PKBM.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 menyelenggarakan Gerakan Indonesia Membaca dan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal. Turunan dari program Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal tersebut melalui PKBM adalah Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKHP). Program PKHP ini dimunculkan di dalam program kesetaraan karena banyak perempuan yang kurang mempunyai keterampilan untuk menunjang kehidupannya. Penyebab ketidakberdayaan perempuan di daerah-daerah tertinggal khususnya, antara lain disebabkan

tidak memiliki pendidikan yang memadai dan tidak memiliki kecakapan hidup, sehingga tidak dapat berpartisipasi aktif di dalam kegiatan pembangunan. Program ini diprakarsai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan program tersebut, stimulannya harus dari pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), tidak bisa dari inisiatif masyarakat.

Angka putus sekolah di Kabupaten Lebak lumayan tinggi. Di samping itu juga disebabkan motivasi dari orangtua untuk menyekolahkan anak masih rendah. Lingkungan mempengaruhi, di mana apabila anak tidak mau sekolah, orangtua mengikuti saja kemauan anak. Anak-anak yang putus sekolah lebih banyak anak perempuan daripada laki-laki. Hal ini karena faktor norma pada masyarakat bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi.

Di samping orang-orang yang telah berumur, peserta didik PKBM ternyata banyak juga yang masih usia sekolah. Mereka adalah anak-anak yang putus sekolah di sekolah-sekolah formal. Namun, mereka yang putus sekolah bukan disebabkan oleh faktor kemiskinan, tetapi lebih disebabkan oleh salah pergaulan dan menikah muda. Setelah anak-anak pasangan muda tersebut cukup besar, maka mereka melanjutkan sekolah melalui program keaksaraan dan kesetaraan di PKBM.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, Kabupaten Lebak juga memiliki komunitas adat terpencil yang disebut komunitas Baduy. Sebagaimana komunitas adat terpencil lainnya di Indonesia, masyarakat Baduy juga menolak pendidikan formal di sekolah-sekolah untuk anak-anak mereka (*Urang Kanekes*. https://id.wikipedia.org/wiki/Urang_Kanekes, diunduh tanggal 27 Agustus 2016). Masyarakat Baduy mempunyai pepatah bahwa mereka jangan menjadi orang-orang pintar, karena kalau jadi orang pintar akan membohongi orang lain. Pepatah ini yang menghambat masuknya pendidikan ke komunitas Baduy.

Meskipun demikian, menurut informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, masyarakat Baduy, terutama Baduy Luar, sudah berbaur dengan masyarakat. Banyak komunitas Baduy Luar yang telah menginginkan pendidikan untuk anak-anak mereka, namun mereka masih terkungkung oleh adat. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Baduy belajar secara otodidak, terutama pengetahuan dasar, seperti membaca, menulis, berhitung (calistung), tanpa melalui sekolah formal.

Sebagian masyarakat Baduy sudah mengupayakan pendidikan untuk anak-anaknya melalui pendidikan nonformal. Namun kungkungan adat yang tidak memperbolehkan mereka memperoleh pendidikan dari luar menyebabkan mereka tidak bisa dikumpulkan di salah satu rumah warga untuk diberi pelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagian masyarakat Baduy menyekolahkan anak-anaknya secara diam-diam. Para tutor memberikan pelajaran Keaksaraan Fungsional dengan cara dari dapur ke dapur (*door to door*). Para tutor menyasati memberikan pendidikan melalui cara-cara yang nonformal. Adapun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyasati dengan cara tutor sebaya atau tutor seadat, yakni menggunakan orang Baduy sendiri sebagai tutor.

Kabid Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan nonformal masih dapat dilakukan di dalam wilayah Baduy. Tapi untuk proses pembelajaran nonformal tidak dapat dilakukan di dalam. Banyak pula komunitas Baduy yang sudah lulus paket-paket kesetaraan. Hal ini tentu juga diketahui oleh para tokoh adat di wilayahnya. Namun mereka diam saja, pura-pura tidak tahu. Jika mereka lapor ke *puun*, tentu tidak boleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hati kecil sebagian masyarakat Baduy sebenarnya ingin mengenyam pendidikan, namun ketika terbentuk pada keyakinan dan tradisi Baduy, hal ini susah direalisasikan.

Sebagian komunitas Baduy, terutama para remaja dan anak-anak mudanya, bekerja sebagai buruh di ladang-ladang milik penduduk sekitar Desa Kanekes. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pada anak-anak yang bekerja sebagai buruh tersebut, beberapa PKBM di lingkungan sekitar Desa Kanekes menyasati dengan memanfaatkan waktu luang mereka setelah bekerja di ladang untuk belajar di program Paket A, Paket B, dan Paket C. Mereka belajar di PKBM pada pukul 14.00 s.d. 17.00. Antusias anak-anak Baduy untuk belajar ternyata cukup bagus. Di samping belajar pada Paket A, Paket B, dan Paket C, mereka juga belajar bahasa Inggris pada hari Sabtu dan belajar komputer pada hari Minggu. Komputer merupakan suatu pengetahuan yang baru bagi mereka. Mereka belajar cara mengoperasikan komputer, dan mengetahui program MS Word, Excel, dan lain-lain.

Keberlanjutan dari program pada masyarakat terasing belum ada, sehingga mereka tidak dapat melakukan usaha mandiri. Beberapa PKBM menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan perempuan, antara lain: budi daya jamur tiram, anyaman pandan, sablon kaos olahraga, pembuatan celana pendek (*boxer*), budi daya Pepaya California, usaha tata boga kue kering, bros flanel, piring lidi, keripik singkong, dan keripik pisang. Pada produksi sablon kaos olahraga, sasaran pemasarannya adalah anak-anak sekolah. Pada produksi celana pendek, sasaran pemasarannya adalah masyarakat pada umumnya, terutama kaum pria. Pada kerajinan bros flanel dan piring lidi, sasaran pemasarannya adalah masyarakat yang menyelenggarakan pesta perkawinan atau pesta-pesta lainnya. Pada produksi keripik singkong dan keripik pisang, pada umumnya dilakukan oleh peserta PKBM yang berprofesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan bahan untuk pembuatan keripik singkong dan keripik pisang mudah didapatkan di ladang-ladang mereka. Sebagian dari program tersebut terkendala dalam pemasaran produknya, meskipun sudah mengikuti

pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dekranasda.

Hambatan dalam penyelenggaraan program di PKBM adalah sulitnya menanamkan kesadaran di masyarakat untuk membayar iuran. Banyak masyarakat yang masih berpola pikir bahwa datang ke PKBM adalah untuk mendapatkan uang bangunan dari pemerintah, bukan untuk membayar iuran. Hal ini menyebabkan banyak PKBM kesulitan untuk membayar para tutornya. Meskipun demikian, para tutor di PKBM pada umumnya telah memiliki pekerjaan tetap (pada umumnya sebagai guru), sehingga tidak terlalu mempersoalkan keterlambatan pembayaran gaji sebagai tutor. Hambatan berikutnya, masyarakat akan meliburkan diri dari kegiatan belajar di PKBM bila ada kegiatan masyarakat, baik upacara atau gotong-royong, di daerahnya masing-masing. Misalnya, pada saat peringatan Rajaban/Mauludan (hari raya Islam) atau pada musim tander (menanam padi) dan panen di sawah. Hambatan terakhir adalah banyak peserta PKBM sewaktu mengikuti ujian tidak mendapat izin dari atasan. Hal ini dikarenakan ujian memakan waktu tiga hari. Sementara itu tidak ada ujian susulan. Padahal dahulu ada ujian susulan.

Di sisi lain, dari 46 PKBM yang terdapat di Kabupaten Lebak, banyak di antaranya yang kondisinya hidup segan mati tak hendak. Untuk menghidupi PKBM, mereka hanya mengajukan proposal dan menunggu, apakah lolos atau tidak. Bila lolos, baru menyelenggarakan pendidikan, baik Keaksaraan Fungsional, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Kecakapan Hidup, maupun kesetaraan.

Di bawah ini diuraikan kegiatan dari beberapa PKBM di Kabupaten Lebak, sehingga dapat diperoleh gambaran program-program kegiatan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan keberadaan PKBM-PKBM tersebut.

1. PKBM Kencana Ungu

PKBM Kencana Ungu adalah salah satu dari 46 PKBM yang terdapat di Kabupaten Lebak, yang terletak di Jalan Raya Rangkasbitung-Leuwidamar, Kampung Dukuh, Desa Leuwidamar, Kecamatan Leuwidamar. PKBM ini berdiri pada tahun 2006, berdasarkan hasil musyawarah kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa, dibentuklah PKBM Kencana Ungu. Pendirian PKBM ini bertujuan untuk menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Visi dari PKBM Kencana Ungu adalah “Dengan sarana dan prasarana yang ada kami berusaha mencerdaskan peserta didik yang berkualitas serta berupaya menggali potensi SDA dan SDM yang ada”. Adapun misi dari PKBM ini adalah “Menghimpun serta membentuk peserta didik aktif, kreatif, berdaya guna, dan berhasil guna dalam upaya mencerdaskan bangsa melalui pendidikan nonformal dan informal” (*Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu*. 2016: 4).

Strategi penyelenggaraan PKBM diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan upaya memecahkan pengangguran melalui pelatihan keterampilan, pelaksanaan pendidikan kesetaraan, melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan dengan pendekatan *Broad Base Education* yang diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat, di mana manfaat tersebut dapat dimiliki oleh lingkungan masyarakat.

Manfaat bagi lingkungan masyarakat setelah mengikuti program yang diselenggarakan PKBM Kencana Ungu adalah:

- a. Memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap/minat untuk bekerja pada perusahaan industri dan/atau usaha mandiri;
- b. Memperoleh penghasilan yang dapat dipergunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga;

- c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- e. Dapat menggali potensi-potensi yang berada di lingkungan masyarakat itu sendiri;
- f. Tumbuhnya aneka matapencaharian baru yang diusahakan oleh masyarakat sehingga mempunyai dampak yang menyerap tenaga kerja pengangguran yang putus sekolah maupun yang tidak melanjutkan sekolah;
- g. Berkurangnya pengangguran, terutama remaja yang putus sekolah (*drop out*) maupun orang dewasa yang tidak mengenyam pendidikan formal sehingga dapat mengurangi kemiskinan;
- h. Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi yang berdampak positif dalam stabilitas keamanan.

Adapun manfaat PKBM Kencana Ungu bagi pemerintah Kabupaten Lebak, adalah:

- a. Meningkatnya kualitas SDM;
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PAD;
- c. Dapat menggali potensi kebudayaan, kerajinan, ciri khas, dan cinderamata daerahnya;
- d. Mengurangi arus urbanisasi dan kerawanan sosial.

(*Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu*. 2016: 5).

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PKBM Kencana Ungu, antara lain:

- a. Taman Penitipan Anak (TPA)
- b. Kelompok Bermain (KB)/Play Group
- c. Taman Kanak-Kanak (TK)

- d. Pendidikan Kesetaraan Paket A (SD)
- e. Pendidikan Kesetaraan Paket B (SMP)
- f. Pendidikan Kesetaraan Paket C (SMA)
- g. Pendidikan Keaksaraan Dasar
- h. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
- i. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
- j. Kursus Komputer
- k. Kursus Bahasa Inggris
- l. Kursus Bahasa Jepang
- m. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- n. Bimbingan Belajar dan Konseling
- o. Aksara Kewirausahaan
- p. Kursus dan Pelatihan (Suslat)

(*Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu*. 2016: 11).

Pada program Aksara Kewirausahaan dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), terdapat berbagai jenis kerajinan yang diajarkan kepada peserta didik, antara lain: kerajinan anyaman piring dan tempat buah dari lidi kelapa sawit, cinderamata Baduy, koja, tempat HP, batik baduy, lomar, aksesoris peniti kerudung, aksesoris akrilik, aksesoris bros panel, kerajinan boga (keripik singkong, keripik pisang, sistik, kue kering, dan lain-lain) (*Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu*. 2016: 16).

Saat ini produk-produk kerajinan tersebut belum dibuat secara massal, melainkan hanya berdasarkan pesanan, sehingga omset produksinya belum bisa banyak. Adapun untuk jejaring pemasaran hasil produksi dari program Aksara Kewirausahaan dan Keaksaraan Usaha Mandiri, pemasaran baru dilaksanakan di warung-warung sekitar tempat tinggalnya dan warung

lingkungan pembelajaran PKBM. Pemasaran yang merintis wirausaha untuk sementara hasil produksinya ditampung di prakoperasi dan warung PKBM. Hasil produksi sebenarnya juga telah dipromosikan melalui pameran-pameran yang diprakasai oleh PKBM Kencana Ungu (*Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu*. 2016: 25).

2. PKBM Nurul Iman

PKBM Nurul Iman terletak di Jalan Raya Cipanas KM 10, Perum Korpri, Blok D 2 Nomor 10, RT 03/RW 05, Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira. Visi PKBM Nurul Iman adalah “Stimulatif, integratif, mandiri, aspiratif, profesional, dan takwa”. Stimulatif adalah memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk dapat turut berperan aktif akan proses belajar mengajar di PKBM Nurul Iman. Integratif adalah melaksanakan program secara terintegritas sesuai dengan tupoksi PKBM Nurul Iman. Mandiri adalah dapat melakukan program-program yang berkaitan dengan pendidikan secara mandiri. Aspiratif adalah dapat berperan baik dalam memberikan ide-ide ataupun kritik dan saran dari pihak manapun. Profesional adalah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Takwa adalah selalu dilandasi dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun misi dari PKBM Nurul Iman adalah “Bersama memberdayakan masyarakat, membangun kemandirian bagi masyarakat melalui kualitas moral, intelektual, dan professional, khususnya masyarakat Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, umumnya untuk masyarakat luas”.

Adapun program-program yang diselenggarakan di PKBM Nurul Iman, antara lain:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF);
- c. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C;

- d. Pendidikan Kelembagaan, meliputi: Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Program Kewirausahaan Mandiri (PKM), Pengarusutamaan Gender (PUG), dan desa vokasi. Pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan, antara lain: menjahit, pembuatan tempe, pembuatan emping melinjo, dan perbengkelan. Untuk pendidikan desa vokasi, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan;
- e. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Karya Ilmu.

Lokasi PKBM Nurul Iman yang terletak di dalam Perumahan Korpri, terpisah dari kampung-kampung penduduk menyebabkan tidak semua penduduk di kampung-kampung tersebut tertarik dan bersedia menjadi peserta didik di PKBM tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus PKBM untuk dapat mengajak dan melibatkan masyarakat yang masih memerlukan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

TBM Karya Ilmu berlokasi di tempat yang sama dengan PKBM Nurul Iman. Di taman bacaan ini buku-buku sengaja diletakkan di teras luar kantor sekretariat PKBM Nurul Iman, sehingga anak-anak dapat membaca setiap saat, tidak harus menunggu sekretariat buka.

3. PKBM Nubalarea

PKBM Nubalarea terletak di Jalan Raya Sampay Cileles, Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikulur. Sejak tahun 2008 PKBM ini mengembangkan usaha budi daya jamur tiram. Jamur tiram, yang dalam bahasa latinnya disebut *pleurotus sp*, ditengarai bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas dan energi, meningkatkan kemampuan seksualitas, dan mencegah penuaan. Selain itu juga berperan penting untuk pengobatan. Hal ini karena jamur tiram mengandung berbagai jenis protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk tubuh, seperti *thiamine* (vitamin B1), *riboflavin* (vitamin B2), *niasin*, *biotin*, dan vitamin C. Sebagai bahan

fungsi jamur mengandung bahan aktif yang terdiri dari senyawa *polisakarida* (glikan), *triterpen*, *nukleotida*, *monitol*, *alkaloid*, dan lain-lain (Jones, 1990). Di alam liar, jamur tiram merupakan tumbuhan saprofit yang hidup di kayu-kayu lunak dan memperoleh bahan makanan dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan organik.

Media untuk menanam jamur tiram menggunakan serbuk gergaji kayu yang terbuang. Dahulu serbuk gergaji hanya dibakar karena merupakan limbah dari usaha penggergajian kayu. Pada zaman dahulu orang takut mengkonsumsi jamur dengan alasan takut mabuk jamur. Tetapi sekarang perilaku masyarakat berubah. Masyarakat yang ingin membeli jamur mendatangi produsen jamur. Harga jual jamur tiram Rp 8.000 s.d. Rp 10.000 per kilo. Pengenalan budi daya jamur dilakukan dengan pelatihan dalam program pendidikan kecakapan hidup, kerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Masalah yang dihadapi PKBM ini adalah modal usaha kecil, tidak ada anggaran untuk membangun saung. Masyarakat hanya diberi pelatihan, tetapi bantuan kemandiriannya tidak ada. Yang terjadi masyarakat bertani jamur tiram di rumah masing-masing yang berdampak pada masalah kesehatan pernapasan dari serbuk jamur tiram, karena mengandung bakteri. Rata-rata produksi jamur tiram adalah 16 kilo per hari. Apabila sudah habis terjual, petani tidak dapat memproduksi lagi terkait keterbatasan modal. Mereka tidak bisa menyambung usaha jamur tiram tersebut.

Selain budi daya jamur tiram, PKBM juga menggerakkan usaha anyaman pandan karena lingkungannya terdapat banyak tanaman pandan. Tetapi usaha tersebut kurang maju bila dibandingkan dengan usaha budi daya jamur tiram. Kendala yang dialami PKBM ini adalah ketidaknyambungan program dari berbagai kelas atau PKBM belum bisa mandiri untuk mem-*back up* kegiatan yang tak terdani.

4. PKBM Hati Nurani

PKBM Hati Nurani terletak di Jalan Tapen, Kampung Leuweung Lojor, Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar. PKBM ini mempusai usaha sablon kaos olahraga. Produksi kaos olahraga ini berdasarkan pesanan. Konsumennya adalah para siswa sekolah di PAUD, SD, SMP, dan SMA. Masyarakat yang dilibatkan dalam usaha ini cukup banyak, terutama kaum bapak di lingkungan sekitar PKBM. Pemasarannya sudah pernah sampai ke Jakarta. Bahan kaos olahraga yang akan disablon pun juga didatangkan dari Jakarta, khususnya dari Pasar Tanah Abang. Pemesanan paling banyak biasanya setiap tahun ajaran baru. Pembuatan desain kaos saat ini sudah menggunakan komputer, tetapi yang mendesain bukan para siswa PKBM, melainkan telah menggunakan tenaga profesional. Kendala yang dialami oleh PKBM ini adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menjalankan program-program *life skill*.

5. PKBM Mandiri

PKBM Mandiri terletak di Jalan Maja Koleang KM 11, Kampung Cilayang, Desa Cilayang, Kecamatan Curugbitung. PKBM ini mempunyai usaha memproduksi celana pendek (dikenal dengan istilah celana *boxer*). Konsumen celana *boxer* pada umumnya kaum pria. Daerah pemasarannya meliputi pasar-pasar di pinggiran Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor, dan juga pasar kaget di sekitar PKBM.

Tantangan dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti program keaksaraan dan kesetaraan adalah sebagian dari mereka bermatapencarian sebagai petani. Anak-anak para petani yang putus sekolah lumayan banyak karena kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya rendah. Hal ini ditunjang oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Anak-anak usia sekolah banyak dipekerjakan di perkebunan untuk membantu orang tuanya.

Wilayah sekitar PKBM ini sebenarnya merupakan sentra produksi Pepaya California. Banyak perkebunan pepaya merupakan usaha masyarakat. Pepaya-pepaya tersebut dijual kepada para tengkulak. Panen pepaya cukup sering, hingga tiga kali dalam dua minggu. Harga per kilo Pepaya California mencapai Rp4.000,00. Usaha PKBM pada awalnya diarahkan ke perkebunan pepaya tetapi terkendala pada dana terkait dengan pembiayaan bibit persemaian.

BAB V
PERAN PKBM DALAM AKULTURASI KEBUDAYAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN KARIMUN DAN KABUPATEN
LEBAK

A. Strategi Akulturasi Kebudayaan di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

Sebagai suatu bentuk perubahan sosial, akulturasi kebudayaan secara global terjadi di seluruh lapisan masyarakat dunia, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Dalam hal ini yang dimaksud dengan akulturasi kebudayaan di daerah 3T adalah interaksi antara masyarakat daerah 3T dengan “agen-agen dari pemerintah yang menjalankan program-program pembangunan”. Sebagaimana dicanangkan dalam program Nawa Cita (9 agenda prioritas), pemerintah memprioritaskan pembangunan di daerah 3T, yang selama ini dianggap kurang tersentuh pembangunan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan kondisi sosial-budaya antara masyarakat di daerah Terdepan dan Terluar dengan masyarakat di daerah Tertinggal. Masyarakat yang tinggal di wilayah Terdepan dan Terluar adalah masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan negara-negara lain dan mempunyai interaksi yang intens dengan masyarakat dari negara-negara tetangga, bahkan juga dengan masyarakat dari negara-negara lain. Posisi wilayah Terdepan dan Terluar mendorong para investor dari negara-negara lain untuk mendirikan perusahaan-perusahaan berskala besar, yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Daerah Terdepan juga mendorong terjadinya migrasi penduduk dari kabupaten-kabupaten/provinsi-provinsi lain ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan dinamika perubahan masyarakat yang terjadi di daerah Terdepan dan Terluar berlangsung lebih cepat daripada masyarakat dari daerah Tertinggal. Masyarakat dari wilayah Terdepan dan Terluar dipacu

untuk berkompetisi, baik dengan sesama warga negara Indonesia yang bermigrasi ke wilayah mereka, maupun warga negara lain.

Sebaliknya, masyarakat di wilayah Tertinggal adalah masyarakat yang daerahnya masih tertinggal dari berbagai aspek pembangunan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakatnya relatif homogen karena sedikitnya arus migrasi masyarakat dari daerah lain ke daerah mereka. Dinamika perubahan masyarakat juga terjadi lebih lambat daripada wilayah Terdepan dan Terluar karena sedikitnya investor untuk menanamkan modal usaha di wilayah mereka. Homogenitas masyarakat di wilayah Tertinggal tersebut juga menyebabkan masyarakatnya kurang kompetitif, karena kurangnya persaingan dengan pendatang dari luar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sikap kompetitif masyarakatnya.

Perbedaan karakteristik masyarakat antara wilayah Terdepan dan Terluar dengan wilayah Tertinggal tersebut menyebabkan peran dan tantangan yang harus dihadapi “lembaga-lembaga masyarakat yang menjalankan program-program pembangunan dari pemerintah” menjadi berbeda. Termasuk dalam hal ini peran dan tantangan yang harus dihadapi para penyelenggara pendidikan nonformal di PKBM-PKBM di antara kedua wilayah dengan karakteristik yang berbeda tersebut. Masyarakat di daerah Tertinggal relatif kurang familiar dengan program-program *life skill* (kecakapan hidup) yang membutuhkan penguasaan teknologi yang tinggi, namun lebih bisa menerima program-program kecakapan hidup yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan. Sebaliknya, pada masyarakat di daerah Terdepan dan Terluar, relatif bisa menerima program-program kecakapan hidup, baik yang membutuhkan penguasaan teknologi maupun peningkatan keterampilan. Meskipun demikian, program-program

peningkatan *life skill* secara umum tetap berdasarkan pada potensi-potensi alam yang terdapat di sekitar tempat tinggal masyarakat.

B. Respon dan Aspirasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program-Program PKBM

Sebagaimana disampaikan di Bab Pendahuluan, PKBM juga merupakan suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberdayaan pendidikan di masyarakat yang dibarengkan dengan usaha mandiri.

Secara umum masyarakat yang tinggal di daerah 3T dapat menerima perubahan dan menginginkan program-program dari pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Lingkungan sosial dan alam di daerah 3T sebenarnya juga mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Adapun potensi alam dan sosial yang dimiliki Kabupaten Karimun, antara lain: pertambangan, pariwisata, perikanan, industri, dan pertanian. Sedangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Lebak, antara lain: pertanian, pertambangan, dan perkebunan (antara lain: karet, cengkeh, kelapa sawit, dan lain-lain).

Meskipun demikian, masyarakat pada umumnya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengembangkan potensi alam dan sosial yang mereka miliki, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat dipahami, karena untuk mengembangkan potensi alam dan sosial tersebut membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit. Sekalipun hal tersebut dapat diwujudkan, kendala berikutnya adalah bagaimana memasarkan produk-produk yang dihasilkan.

Kabupaten Karimun sebagai salah satu daerah Terdepan dan Terluar, mempunyai posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan kedua negara tetangga tersebut lebih baik daripada Indonesia. Hal inilah yang mendorong banyak masyarakat untuk lebih memilih merantau dan bekerja di kedua negara tersebut daripada berusaha di tanah airnya sendiri. Kemudahan untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji besar, meskipun tidak mempunyai keterampilan, menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak lulusan SMA yang memilih bekerja di Malaysia atau Singapura daripada melanjutkan kuliah di Indonesia.

Kesadaran untuk mempunyai keterampilan untuk bekerja pada masyarakat baru muncul ketika banyak perusahaan asing yang mendirikan usahanya di wilayah Kabupaten Karimun, namun mereka merekrut pekerja dari negara-negara lain, seperti: Korea Selatan, Malaysia, India, Filipina, dan lain-lain. Sementara masyarakat Karimun sendiri hanya sedikit yang terekrut karena tidak mempunyai keterampilan sesuai yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan asing tersebut. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum mendorong generasi muda untuk “beralih haluan” dari mental pekerja menjadi mental berwirausaha, dengan membudidayakan potensi alam yang ada di daerahnya.

Hal sebaliknya terjadi pada masyarakat di Kabupaten Lebak. Karena relatif sedikit perusahaan-perusahaan besar, banyak masyarakat yang memanfaatkan potensi alam untuk meningkatkan kesejahteraannya, seperti: budi daya jamur tiram, anyaman pandan, sablon kaos olahraga, pembuatan celana pendek (*boxer*), budi daya Pepaya California, usaha tata boga kue kering, bros flanel, piring lidi, keripik singkong, keripik pisang, dan lain-lain.

Sebagai salah satu daerah Tertinggal, banyak masyarakat yang kondisi perekonomiannya kurang baik. Hal ini berdampak pada kesadaran para

orangtua untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dalam hal ini PKBM-PKBM di Kabupaten Lebak banyak berperan dalam mengubah pandangan masyarakat dengan memberikan pendidikan terhadap anak-anak yang putus sekolah.

Secara umum, baik pemerintah Kabupaten Karimun maupun Kabupaten Lebak mempunyai kelompok masyarakat yang termasuk dalam komunitas adat terpencil/khusus, yakni Suku Laut di Kabupaten Karimun dan Suku Baduy di Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Karimun, Suku Laut tidak mengelompok di suatu tempat, melainkan tersebar di beberapa tempat di Pulau Kundur, antara lain: Bubu, Waseng, dan Prayun. Seperti halnya masyarakat daerah 3T pada umumnya, masyarakat adat terpencil pun sebenarnya juga menginginkan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Masyarakat Suku Laut relatif lebih terbuka dibandingkan dengan masyarakat Baduy. Pada umumnya mereka tidak menolak perubahan dan menerima program-program pembangunan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini ditandai dengan mereka mau menerima program-program yang dilakukan pemerintah daerah, seperti: pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2011 dan program KTP-nisasi pada tahun 2015. Sebelum menerima program pemugaran RTLH dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun, masyarakat Suku Laut tinggal di rumah-rumah berdinding kayu, berlantai tanah, dan beratap daun rumbia. Saat ini masyarakat Suku Laut, terutama di Prayun, tinggal di rumah-rumah permanen bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Bila sebelumnya hanya menggunakan lampu minyak tanah, saat ini mereka pun telah menikmati aliran listrik untuk penerangan rumahnya.

Komunitas Suku Laut juga antusias untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka juga menginginkan pendidikan untuk para orangtua yang masih banyak yang buta aksara dan pendidikan untuk anak-anak. Namun

mereka terbentur pada resistensi dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Mereka disebut dengan “*orang mantang*”, yang berarti orang yang badannya bau karena jarang mandi. Memang masyarakat Suku Laut tinggal di pesisir pantai dan kekurangan air bersih, sehingga relatif jarang mandi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan melibatkan komunitas ini, baik para orangtua maupun anak-anak, sebagai warga belajar di PKBM. Keterbukaan masyarakat Suku Laut terhadap program-program pendidikan yang diberikan kepada mereka menyebabkan penyelenggara PKBM tidak mengalami kesulitan untuk mendatangkan para tutor dari luar komunitas mereka.

Berbeda halnya dengan masyarakat Suku Laut di Kabupaten Karimun yang tidak menolak perubahan dan ingin meningkatkan kesejahteraannya, pada masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak terjadi penolakan terhadap program-program pembangunan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan terdapatnya aturan adat yang tidak membolehkan pembangunan di dalam kawasan mereka, yang harus dipatuhi bersama. Mereka juga menolak sekolah sebagai lembaga pendidikan formal untuk anak-anak mereka dengan alasan bertentangan dengan hukum adat mereka. Hal ini yang menyebabkan angka buta aksara di Kabupaten Lebak secara keseluruhan masih cukup tinggi. Meskipun demikian, di level individu-individu sebenarnya banyak orang-orang Baduy yang menginginkan perubahan. Mereka inilah yang secara sembunyi-sembunyi mengikutsertakan anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan nonformal di PKBM, khususnya PKBM Kencana Ungu. Anak-anak mereka pun belajar melalui paket-paket program keaksaraan dan kesetaraan yang diselenggarakan oleh PKBM Kencana Ungu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunitas Suku Laut di Kabupaten Karimun lebih terbuka terhadap perubahan dibandingkan dengan Suku Baduy di Kabupaten Lebak.

C. Manfaat Program-Program Usaha Mandiri terhadap Masyarakat

PKBM-PKBM di Kabupaten Karimun maupun Kabupaten Lebak menjalankan program-program kewirausahaan yang diangkat dari potensi sumber daya alam di wilayahnya. Program kewirausahaan yang dilakukan di PKBM-PKBM di Kabupaten Karimun, antara lain: budi daya lele, *home industry* kerupuk ikan tenggiri, sayuran hidroponik, dan lain-lain. Adapun program *life skill* yang dilakukan, antara lain: Bahasa Inggris, menjahit, komputer, kecantikan, dan pendidikan agama. Khusus untuk *home industry* kerupuk ikan tenggiri, secara tidak langsung ikut meningkatkan kesejahteraan para nelayan karena para ibu pembuat kerupuk ikan tenggiri membeli ikan tenggiri setiap harinya dari para nelayan dan membeli sagu dari petani sagu.

Secara umum masyarakat Kabupaten Lebak mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditas industri kecil dan kerajinan, antara lain: anyaman piring dan tempat buah dari lidi kelapa sawit, cinderamata Baduy (tenun dan batik), aksesoris, gula aren, makanan ringan (emping melinjo, keripik singkong, keripik pisang, sistik, kue kering, dan lain-lain), pembuatan jamur tiram, dan lain-lain. Beberapa PKBM mempunyai usaha sablon kaos dan celana olahraga, serta pembuatan celana pendek. Di samping itu ada juga kursus menjahit dan komputer. Mereka pada dasarnya dapat menerima hal-hal yang menunjang perbaikan ekonomi mereka, termasuk di antaranya investasi dan penanaman modal dari dalam maupun luar negeri, dengan persyaratan mereka dilibatkan dalam menjalankan kegiatan (Sejarah terbentuknya Lebak <http://iemaes.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-terbentuknya-lebak.html>, diunduh tanggal 21 September 2016).

Warga belajar yang mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh PKBM tentu mempunyai alasan-alasan tertentu. Baik di Kabupaten Karimun maupun Kabupaten Lebak, alasan menjadi warga belajar di PKBM adalah untuk memperoleh status sosial dengan memperoleh ijazah pendidikan

yang lebih tinggi, mendapat kenaikan pangkat, dan menduduki jabatan tertentu (anggota DPR, PNS, kepala desa, ketua RW, dan lain-lain). Ijazah yang diperoleh juga digunakan untuk melamar ke perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karimun. Adapun alasan yang mendasari warga belajar di PKBM di Kabupaten Lebak, antara lain: putus sekolah (baik karena faktor ekonomi maupun dikeluarkan dari sekolah karena salah pergaulan), memperoleh *longlife education*, meningkatkan *life skill*, keterampilan, dan kecakapan hidup, dan memperoleh ijazah.

Masyarakat di Kabupaten Karimun membutuhkan PKBM untuk memperoleh ijazah kesetaraan, agar dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan asing, seperti PT. Saipem Indonesia, PT. Karimun Sembawang Shipyard, PT. Timah (KIP Mitra), dan lain-lain. Sementara itu masyarakat yang menggunakan ijazah untuk pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan pertanian relatif kurang berkembang.

Sebagaimana disampaikan di atas, sebagai salah satu daerah Tertinggal, angka buta aksara dan anak putus sekolah di Kabupaten Lebak masih cukup tinggi. Meskipun angka buta aksara dan angka putus sekolah di Kabupaten Lebak cukup tinggi, namun animo masyarakat untuk melepaskan diri dari buta aksara ataupun menamatkan pendidikan cukup tinggi. Saat ini warga belajar Kabupaten Lebak yang mengikuti program Paket A mencapai 83 orang (sebagian besar adalah masyarakat Baduy di Kecamatan Leuwidamar), Paket B mencapai 938 orang, dan Paket C 1.019 orang (*Kabupaten Lebak dalam Angka*, 2016:78). Banyaknya warga belajar yang mengikuti program Paket B dan Paket C inilah yang menunjukkan bahwa animo mereka untuk memperoleh ijazah setara SMP dan SMA cukup tinggi. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai motivasi kepentingan politik (mencalonkan diri sebagai kepala desa dan anggota legislatif) atau untuk

memperoleh pekerjaan yang lebih baik, misalnya menjadi pekerja pabrik, yang memang mensyaratkan minimal lulusan SMA.

Untuk meningkatkan pendapatan keluarga, beberapa PKBM di Kabupaten Lebak menyelenggarakan program Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan. Program ini merupakan turunan dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, yakni Gerakan Indonesia Membaca dan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal. Beberapa program yang telah berjalan, antara lain: budi daya jamur tiram, anyaman pandan, sablon kaos olahraga, pembuatan celana pendek (*boxer*), budi daya Pepaya California, usaha tata boga kue kering, bros flanel, piring lidi, keripik singkong, dan keripik pisang. Pada program Aksara Kewirausahaan dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), terdapat berbagai jenis kerajinan yang diajarkan kepada peserta didik, antara lain: kerajinan anyaman piring dan tempat buah dari lidi kelapa sawit, cinderamata Baduy, koja, tempat HP, batik Baduy, lomar, aksesoris peniti kerudung, aksesoris akrilik, aksesoris bros panel, kerajinan boga (keripik singkong, keripik pisang, sistik, kue kering, dan lain-lain) (*Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu. 2016:16*).

Adapun untuk jejaring pemasaran hasil produksi dari program Keaksaraan Kewirausahaan dan Keaksaraan Usaha Mandiri, pemasaran baru dilaksanakan di warung-warung sekitar tempat tinggalnya dan warung lingkungan pembelajaran PKBM. Pemasaran yang merintis wirausaha untuk sementara hasil produksinya ditampung di prakoperasi dan warung PKBM. Hasil produksi sebenarnya juga telah dipromosikan melalui pameran-pameran yang diprakasai oleh PKBM Kencana Ungu (*Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu. 2016:25*).

Berdasarkan hasil penelitian, manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program-program di PKBM adalah: warga belajar dapat melakukan kegiatan

baca, tulis, hitung (calistung) dan bersosialisasi dengan warga masyarakat; terjadi kemajuan pada pola pikir; terjadi perubahan dari yang semula menjadi pekerja kasar/kuli akhirnya bisa memperoleh pekerjaan di perusahaan ataupun instansi pemerintahan; serta menambah wawasan dan kemandirian.

Khusus pada masyarakat Suku Laut di Kabupaten Karimun dan Suku Baduy di Kabupaten Lebak, secara umum mereka merasakan manfaat dari keberadaan PKBM di dekat tempat tinggal mereka. Pada komunitas Suku Laut ini beberapa tahun yang lalu mereka belum tersentuh program pendidikan, meskipun telah mendapat bantuan pembangunan rumah layak huni dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Untuk mengatasi hal tersebut, PKBM Bakti Negeri membuat program pendidikan inklusi dalam bentuk paket. Pada komunitas Suku Laut di Desa Teluk Sitimbul, mereka pada umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan. Sebagian besar sudah mapan secara ekonomi karena tercukupi dari hasil laut. Meskipun demikian, banyak anggota masyarakatnya yang masih buta huruf, sehingga tidak dapat mengetahui informasi melalui teks-teks tertulis dan bersosialisasi dengan masyarakat di luar Suku Laut.

Pada kasus masyarakat Baduy, peraturan adat yang harus mereka taati menyebabkan anak-anak mereka tidak dapat memperoleh pendidikan formal dari sekolah. Meskipun demikian, sebagian masyarakat Baduy telah mempunyai kesadaran mengenai pentingnya pendidikan. Mereka mengupayakan pendidikan untuk anak-anaknya melalui lembaga pendidikan nonformal. Namun kendalanya, kungkungan adat yang tidak memperbolehkan mereka memperoleh pendidikan dari luar menyebabkan mereka tidak bisa dikumpulkan di salah satu rumah warga untuk diberi pelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagian masyarakat Baduy menyekolahkan anak-anaknya secara diam-diam. Para tutor memberikan pelajaran Keaksaraan Fungsional dengan cara dari dapur ke dapur (*door to*

door). Para tutor menyiasati memberikan pendidikan melalui cara-cara yang nonformal. Adapun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiasati dengan cara tutor sebaya atau tutor seadat, yakni menggunakan orang-orang Baduy sendiri (yang sudah menginginkan perubahan dalam komunitas mereka) sebagai tutor.

Kabid Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan nonformal masih dapat dilakukan di dalam wilayah Baduy. Tapi untuk proses pembelajaran nonformal tidak dapat dilakukan di dalam wilayah Baduy, sehingga anak-anak mereka harus mencari lembaga pendidikan nonformal di luar wilayah mereka. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan dibarengkan dengan aktivitas para remaja dan anak-anak remaja yang bekerja sebagai buruh di ladang-ladang penduduk sekitar wilayah komunitas Baduy.

Sebagaimana disampaikan di atas, sebagian komunitas Baduy, terutama para remaja dan anak-anak mudanya, bekerja sebagai buruh di ladang-ladang milik penduduk sekitar Desa Kanekes. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pada anak-anak yang bekerja sebagai buruh tersebut, beberapa PKBM di lingkungan sekitar Desa Kanekes menyiasati dengan memanfaatkan waktu luang mereka setelah bekerja di ladang untuk belajar di program Paket A, Paket B, dan Paket C. Antusias anak-anak Baduy untuk belajar ternyata cukup bagus. Di samping belajar pada Paket A, Paket B, dan Paket C, mereka juga belajar Bahasa Inggris dan komputer.

D. Langkah-Langkah yang Perlu Diterapkan Pemerintah Berkaitan dengan Program PKBM

Menurut Solichudin, dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal yang paling sulit diatasi adalah menghilangkan budaya miskin, yang sudah terbentuk secara turun-temurun. Budaya ini terbentuk ketika masyarakat

sudah terlalu lama dililit oleh kemiskinan. Dalam hal ini analisis budaya miskin bersifat *inward looking* (mencermati sikap, perilaku dan cara pandang orang miskin itu sendiri). Orientasi nilai budaya orang miskin itu telah membentuk hambatan bagi upaya untuk melepas mata rantai kemiskinan. Budaya miskin ini muncul dari komunal-komunal masyarakat yang sudah turun-temurun miskin dan kemudian menjadi situs bagi pengembangbiakan nilai budaya miskin, sehingga lingkaran kemiskinan semakin mustahil dapat diputus oleh pemerintah (Solichudin, 2010).

Solichudin memberikan contoh budaya miskin sebagai berikut: seorang bapak yang berprofesi sebagai buruh tani yang miskin, mempunyai anak juga seorang buruh tani yang miskin, maka terlalu amat sulit dapat meyakinkan cucu-cucunya bahwa mereka sebenarnya berhak mempunyai cita-cita untuk menjadi orang yang tidak miskin, misalnya menjadi seorang jenderal, atau seorang dokter, atau seorang saudagar, asalkan ia mau berjuang, berdisiplin, dan bekerja keras mengejar cita-citanya tersebut. Yang akan dipercayai oleh para cucunya adalah mereka hidup hanya untuk menjadi orang miskin sebagaimana orangtua dan kakek-neneknya. Fenomena ini disebut dengan *born to be poor* (dilahirkan untuk menjadi orang miskin). Sikap pesimis untuk dapat mengubah kemiskinan yang sedang dihadapinya, telah membentuk interaksi sosial di lingkungan keluarga mereka, dan menjadi wahana sosialisasi nilai bagi anak-anak secara berkesinambungan. Hal ini yang menyebabkan rantai kemiskinan semakin melilit kuat dan sulit untuk dapat diurai. Interaksi sosial dan wahana sosialisasi nilai budaya miskin seperti ini akan semakin mengakar kuat pada masyarakat yang telah lekat dililit kemiskinan (Solichudin: 2010).

Berkaitan dengan pendapat Solichudin tersebut, keberadaan PKBM diharapkan juga dapat membantu masyarakat lepas dari kemiskinan yang menjerat mereka, terutama dengan adanya program *life skill* dan keaksaraan

usaha mandiri. Dalam program-program tersebut warga belajar diajak berwirausaha dengan mengangkat potensi sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Program kewirausahaan yang dilakukan di PKBM-PKBM Kabupaten Karimun, antara lain: budi daya lele, *home industry* kerupuk ikan tenggiri, dan sayuran hidroponik. Program *life skill* yang diperkenalkan kepada warga belajar di Kabupaten Karimun meliputi: Bahasa Inggris, menjahit, komputer, kecantikan, dan pendidikan agama.

Adapun program kewirausahaan yang dilakukan di PKBM-PKBM Kabupaten Lebak lebih banyak variasinya, antara lain: anyaman piring dan tempat buah dari lidi kelapa sawit, cinderamata Baduy (tenun dan batik), aksesoris, gula aren, makanan ringan (emping melinjo, keripik singkong, keripik pisang, sistik, kue kering, dan lain-lain), pembuatan jamur tiram, sablon kaos dan celana olahraga, serta pembuatan celana pendek. Program *life skill* yang diperkenalkan kepada warga belajar di Kabupaten Lebak meliputi kursus menjahit dan komputer.

Sebagian dari program kewirausahaan tersebut di atas terkendala dalam pemasaran produknya. Untuk mengantisipasi produk-produk dari masyarakat tidak terserap di pasar, saat ini produk-produk kerajinan tersebut belum dibuat secara massal, melainkan hanya berdasarkan pesanan, sehingga omset produksinya belum bisa banyak. Adapun untuk jejaring pemasaran hasil produksi dari program Aksara Kewirausahaan dan Keaksaraan Usaha Mandiri, pemasaran baru dilaksanakan di warung-warung sekitar tempat tinggalnya dan warung lingkungan pembelajaran PKBM. Pemasaran yang merintis wirausaha untuk sementara hasil produksinya ditampung di prakoperasi dan warung PKBM. Hasil produksi sebenarnya juga telah dipromosikan melalui pameran-pameran yang diprakasai oleh PKBM Kencana Ungu (*Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu*. 2016:25). Sementara itu, pada program *life skill*, kendala yang dihadapi

adalah keterampilan yang diperoleh ternyata belum cukup untuk melamar pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tersebut, atau mendirikan usaha sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah perlu memikirkan stimulan untuk warga belajar, baik berupa dana, fasilitas, maupun promosi, sehingga ada keberlanjutan program-program tersebut dalam bentuk usaha-usaha mandiri/wirausaha sesuai dengan keterampilan yang diperoleh di PKBM. Di samping itu, pemerintah perlu mengupayakan untuk membuka jaringan pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat setelah diperkenalkan potensi kewirausahaan dari PKBM-PKBM setempat. Salah satu caranya adalah lebih sering menyelenggarakan pameran produk lokal dari masyarakat di daerahnya. Dalam upaya melakukan pameran-pameran produk setempat, pemerintah daerah harus menggandeng Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Dengan demikian dapat membuka jalan untuk memasarkan produk-produk masyarakat yang dihasilkan melalui pendidikan kecakapan hidup di PKBM.

Adapun kendala-kendala umum yang ditemui PKBM-PKBM di Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan program-programnya, antara lain: kurangnya sarana dan prasarana penunjang PKBM; kurangnya dana operasional PKBM; minimnya stimulan dari pemerintah pusat; minimnya perhatian dari pemerintah daerah di luar Dinas Pendidikan; kurangnya dana untuk transportasi para tutor; kurangnya tenaga pelatih untuk kursus-kursus (misal: menjahit, komputer, dan lain-lain); kurang disiplinnya warga belajar untuk mengikuti pelajaran (padahal pada awalnya mereka antusias mengambil Paket A, Paket B, atau Paket C); para tutor masih mengandalkan guru dari sekolah formal; dan secara geografis wilayah Kabupaten Karimun adalah pulau-pulau sehingga membutuhkan biaya operasional yang lebih besar. Kendala khusus yang dihadapi di Kabupaten Karimun adalah wilayah

geografisnya yang berupa pulau-pulau, sehingga untuk menjangkau wilayah satu dengan yang lain harus menggunakan sarana transportasi laut, seperti: kapal cepat, perahu klotok, dan lain-lain. Perjalanan dengan alat transportasi laut tersebut tidak dapat dilakukan apabila kondisi cuaca sedang buruk, seperti: hujan badai, angin kencang, dan ombak besar.

Kendala-kendala umum yang dihadapi PKBM-PKBM di Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan program-programnya, antara lain: gedung/tempat belajar mengajar masih kurang layak (banyak yang masih menggunakan rumah pribadi masyarakat); kurang minatnya masyarakat untuk belajar dan meningkatkan kemampuan hidup karena faktor adat-istiadat dan ekonomi; kurangnya SDM dari sekitar PKBM sehingga harus mengambil tentor dari wilayah yang jauh; kurangnya waktu pembelajaran bagi warga belajar; ketidaksinambungan program antara jenjang kelas yang rendah ke jenjang yang lebih tinggi; dan PKBM belum mandiri untuk mem-*back up* kegiatan yang tidak didanai.

Sebagaimana disampaikan di Bab II (Landasan dan Konsep), prinsip dasar pembentukan PKBM di masyarakat adalah “dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Hal ini berarti bahwa semua program dan kegiatan di PKBM dilaksanakan oleh masyarakat setempat, termasuk dalam pembiayaannya. Meskipun demikian, salah satu hambatan dalam penyelenggaraan program di PKBM adalah sulitnya menanamkan kesadaran di masyarakat untuk membayar iuran untuk penyelenggaraan program-program di PKBM. Banyak masyarakat yang masih berpola pikir bahwa mereka datang ke PKBM adalah untuk mendapatkan uang (sebagai bagian dari program pembangunan dari pemerintah), bukan untuk membayar iuran. Hal ini menyebabkan banyak PKBM kesulitan untuk membayar honor para tutornya. Meskipun demikian, para tutor di PKBM pada umumnya telah memiliki pekerjaan tetap (pada umumnya sebagai guru), sehingga tidak terlalu mempersoalkan

keterlambatan pembayaran gaji sebagai tutor. Di sisi lain, ditilik dari kemampuan ekonominya, warga belajar sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran. Mereka pada umumnya mampu untuk membeli barang-barang yang lebih mahal (misalnya: sepeda motor, *mobile phone*, dan lain-lain), apalagi hanya membayar iuran sebagai warga belajar di PKBM. Hal ini pula yang menyebabkan banyak PKBM belum bisa mandiri untuk menyelenggarakan program-program yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Berkaitan dengan persoalan di atas, untuk mengatasi hal tersebut, setelah lulus paket program Keaksaraan dan Kesetaraan, ijazah mereka “ditahan” oleh pengurus PKBM dan baru diberikan setelah melunasi iuran.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Akulturasi kebudayaan adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda, yang berlangsung dengan damai dan serasi. Akulturasi kebudayaan juga terjadi di daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Dalam kaitannya dengan program-program pembangunan di daerah 3T, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkontribusi melalui program pendidikan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah penancangan program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, yang direalisasikan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dalam program PKBM ini, masyarakat selain dientaskan dari buta aksara maupun memperoleh pendidikan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), juga diberi pendidikan kecakapan hidup yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi sumber daya dan kearifan lokal yang bernilai ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi, yakni Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (untuk daerah yang berkarakteristik Terdepan dan Terluar) dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (untuk daerah yang berkarakteristik Tertinggal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan respon dan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pendidikan masyarakat oleh PKBM, dapat disampaikan dua hal. Pertama, secara umum masyarakat di daerah 3T menerima pendidikan kecakapan hidup (yang dimasukkan ke dalam program Keaksaraan dan Kesetaraan) yang

diselenggarakan oleh PKBM. Terlebih bila program kecakapan hidup tersebut mengangkat potensi-potensi alam dan sosial yang dimiliki masyarakat di daerah tersebut (misal: kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan lain-lain). Kedua, secara umum, masyarakat Suku Laut lebih menerima program kecakapan hidup yang dilakukan melalui PKBM dibandingkan dengan masyarakat Baduy. Sebaliknya, masyarakat Baduy menolak program-program pembangunan dari pemerintah karena terdapat aturan adat yang melarangnya. Meskipun demikian, di level individu sebenarnya banyak orang-orang Baduy yang menginginkan perubahan. Mereka inilah yang secara sembunyi-sembunyi menjadi warga belajar di PKBM.

Berkaitan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya program kecakapan hidup dan usaha mandiri oleh PKBM, dapat disampaikan tiga hal. Pertama, masyarakat secara umum dapat merasakan manfaat dari program kecakapan hidup yang diselenggarakan PKBM, namun manfaat yang paling dirasakan bukan pada program kecakapan hidup, tetapi memperoleh ijazah kesetaraan dari program Kesetaraan (terutama Paket B dan Paket C). Dengan memperoleh ijazah jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat digunakan untuk promosi menduduki jabatan tertentu (misal: anggota DPR, kepala desa, ketua RW, dan lain-lain). Ijazah kesetaraan yang diperoleh juga digunakan untuk mencari pekerjaan yang dianggap lebih baik (misal: melamar ke perusahaan-perusahaan asing). Dengan demikian alasan menjadi warga belajar di PKBM bukan untuk memperoleh pembelajaran mengenai kecakapan hidup maupun *life skill*, melainkan untuk memperoleh ijazah kesetaraan. Kedua, sebagian PKBM telah berhasil mendorong masyarakat untuk mempunyai usaha yang mapan (seperti: pembuatan kerupuk ikan tenggiri, sablon kaos olahraga, konveksi celana, budi daya jamur tiram, budi daya Pepaya California, pembuatan keripik singkong dan

keripik pisang, dan lain-lain). Usaha-usaha tersebut secara tidak langsung ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebagian lagi baru terbatas memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, belum ditindaklanjuti dengan upaya mengembangkannya sebagai usaha secara mandiri/wirausaha sesuai dengan keterampilan yang diperoleh di PKBM (misalnya: kerajinan anyaman pandan, budi daya tanaman hidroponik, budi daya lele, anyaman piring dari lidi kelapa sawit, dan lain-lain). Ketiga, kendala utama yang mereka hadapi adalah pemasaran dari hasil produksi mereka. Saat ini pemasaran baru sebatas di lingkungan masyarakat sekitar. Di samping program usaha mandiri, masyarakat juga merasakan manfaat dari penyelenggaraan program *life skill*, seperti: Bahasa Inggris, menjahit, komputer, kecantikan, dan pendidikan agama (Islam). Namun sertifikat yang diperoleh dari penyelenggaraan program *life skill* ini belum dapat digunakan untuk melamar pekerjaan maupun untuk berwirausaha.

Berkaitan dengan langkah-langkah peningkatan program yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan PKBM, dapat disampaikan beberapa hal. Pertama, pemerintah telah berupaya mengubah *mindset* warga belajar agar tidak semata-mata mendapatkan ijazah untuk meningkatkan eksistensi diri, tetapi juga peningkatan kecakapan hidup dan keterampilan. Kedua, pemerintah telah memberikan dana program untuk PKBM, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Ketiga, pemerintah berupaya mengoptimalkan peran dari komunitas warga Baduy sendiri untuk mendukung program PKBM, tapi masih terbentur pada kesadaran warga Baduy terhadap pentingnya PKBM. Keempat, pemerintah belum membuka jaringan pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat setelah diperkenalkan potensi kewirausahaan dari PKBM-PKBM setempat. Salah satu caranya adalah lebih sering menyelenggarakan pameran produk lokal dari masyarakat di daerahnya. Kelima, pemerintah daerah belum menjalin

kerjasama dengan dinas-dinas yang lain, berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan perlu melibatkan orang-orang dari internal komunitas masyarakat adat itu sendiri, terutama masyarakat Baduy, untuk mengubah *mindset*/pola pikir mereka mengenai pentingnya pendidikan dan kecakapan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
2. Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga Kerja perlu bekerjasama dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini PKBM sebagai penyelenggara, sementara materi pendidikan dan pelatihan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang ditunjuk Dinas Tenaga Kerja. Dengan demikian sertifikat yang diperoleh dapat digunakan untuk melamar pekerjaan maupun untuk usaha mandiri.
3. Dinas Pendidikan perlu bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk membuka jaringan pemasaran dari produk-produk warga belajar PKBM.
4. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) untuk menyelenggarakan pameran produk lokal yang dihasilkan dari warga belajar di PKBM, sehingga dapat membuka jalan untuk memasarkan produk-produk mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- 122 Daerah Ini Ditetapkan Pemerintah Sebagai Daerah Tertinggal 2015-2019. <http://setkab.go.id/122-daerah-ini-ditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019/>. diunduh tanggal 10 Oktober 2016.
- Bappenas. 2014. *Daftar Kawasan Perbatasan 2010 – 2014 Concise History*. London: Hudson and Thames, 2000.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. 2015. *Geliat Pendidikan Nonformal: Menggapai Asa Menuai Prestasi*
- Garna, Y. 1993. Masyarakat Baduy di Banten, dalam Masyarakat Terasing di Indonesia, Editor: Koentjaraningrat & Simorangkir, *Seri Etnografi Indonesia No.4*. Jakarta: Departemen Sosial dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Hiryanto. “Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)”. *Makalah* pada Pelatihan Tenaga Pendidik PKBM Sejahtera, Sleman, D.I. Yogyakarta, 3 Januari 2009.
- Kabupaten Lebak dalam Angka*. 2016. Rangkasbitung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak.
- Kabupaten Lebak, Realisasi PAD Lampau Rp 2.234 Triliun*. Senin, 11/01/2016. <http://www.neraca.co.id/article/63957/kabupaten-lebak-realisasi-pad-lampau-rp2234-triliun> , diunduh tanggal 4 Oktober 2016.
- Kehidupan sosial budaya masyarakat Suku Laut Suku (Orang) Laut, Kepulauan Riau Dipublish Agustus 6, 2014, <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/947/suku-orang-laut-kepulauan-riau>, diunduh 26 September 2016, Pk 12.40
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kota Kecil Penuh Pesona (Lebak-Ku)*. Selasa, 23 Agustus 2016. <http://usepbocahpkbm.blogspot.co.id/>, diunduh tanggal 14 September 2016
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014*. 2014. Rangkasbitung: Pemerintah Kabupaten Lebak.

Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Alam melalui Desa Vokasi. Kamis, 28 Juli 2016. <http://lebakkab.go.id/berita/baca/mengoptimalkan-pemanfaatan-potensi-alam-melalui-desa-vokasi>, diunduh tanggal 15 September 2016.

Permana, C.E. 2001. *Kesetaraan gender dalam adat inti jagat Baduy*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Petunjuk Teknis Penguatan PKBM Melalui Permagangan dan Tata Cara Memperoleh Bantuan. 2015. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Teknis Program Desa Vokasi dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016. 2016. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Produk Kerajinan Luar Sekolah Siap Hadapi MEA. Jumat, 19 Desember 2014. <http://lebakkab.go.id/berita/baca/mengoptimalkan-pemanfaatan-potensi-alam-melalui-desa-vokasi>, diunduh tanggal 14 September 2016

Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kencana Ungu. 2016.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). <http://visiuniversal.blogspot.co.id/2014/02/pusat-kegiatan-belajar-masyarakat-pkbm.html>.

Sejarah Terbentuknya Lebak. 2014. <http://iemaes.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-terbentuknya-lebak.html>, diunduh tanggal 21 September 2016

Sihombing, U. 1999. *Pendidikan non formal kini dan masa depan.* Jakarta: PD Mahkota.

_____. 2000. *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strateg, Konsep Kiat dan Pelaksanaan.* Jakarta: PD Mahkota.

Solichudin, Iman. 2010. *Kabupaten Lebak Melawan Kemiskinan dengan Pemekaran Daerah.* <http://imanlebak.blogspot.co.id/2010/11/kabupaten-lebak-melawan-kemiskinan.html>, diunduh tanggal 21 September 2016.

Sudjana S, D., 2000. *Pendidikan non formal: Wawasan sejarah perkembangan, falsafah dan teori pendukung, serta asas*. Bandung: Falah Production.

Suku (Orang) Laut, Kepulauan Riau, dipublish Agustus 6, 2014.
<http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/947/suku-orang-laut-kepulauan-riau>, diunduh 26 September 2016, Pk 12.40.

Target dan Indikator Pembangunan Nasional Indonesia 2014-2019 Berdasarkan Visi-Misi Presiden Joko Widodo (NAWACITA)

Zaini, H.A. Helmy Faisal. 2010. “Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal”. *Makalah* dalam Seminar antar Jurusan Fakultas Manajemen, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 25 Mei 2010, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.